

**INTEGRASI SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DAN MADRASAH DI
PONDOK PESANTREN DAARUL AITAM NURUL IMAN KURIPAN KIDUL,
KESUGIHAN , CILACAP.**



TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Bidang Manajemen Pendidikan Islam**

**Oleh
ASHADI
NIM 1910622**

**MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(IAINU) KEBUMEN
2021**

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
IAINU KEBUMEN



TERAKREDITASI BAN PT

Jalan Tentara Pelajar No. 25 Telp/Fax (0287) 385902 Kebumen 54316

Website: www.pasca.iainukebumen.ac.id Email: info@pasca.iainukebumen.ac.id

NOTA DINAS

Hal : Tesis

Kepada:

Yth. Direktur Pasca Sarjana IAINU Kebumen

c/q Biro Tesis

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pasca Sarjana IAINU Kebumen No.In. 11/PS.MPI/IAINU/SK/D/I/ /2021 Tertanggal Januari 2021 tentang Judul dan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Magister (S.2) Tahun Akademik 2020/2021. Atas tugas kami sebagai Pembimbing Tesis Saudara/i:

Nama	: Ashadi
NIM	1910622
Program Studi	: Magister Manajemen Pendidikan Islam
Tahun Akademik	: 2020/2021
Judul Tesis	: Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren Dan Pendidikan Madrasah Di Yayasan Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, ahirnya kami anggap Tesis tersebut sebagai hasil penelitian / kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang, munaqasyahkan Tesis Pascasarjana IAINU Kebumen.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar Tesis dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Kebumen, April 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Sulis Rokhmawanto, M.S.I.

NIDN : 213103850

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul : **INTEGRASI SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DAN MADRASAH DI PONDOK PESANTREN DAARUL AITAM NURUL IMAN DESA KURIPAN KIDUL, KEC. KESUGIHAN, KAB. CILACAP**

telah dipertahankan dihadapan sidang dewan penguji tesis pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Juni 2021

Pukul : 10.00 - 11.00

Oleh


Nama : **ASHADI**

NIM : 1910622

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Dewan Penguji Tesis


Ketua Sidang : Fikria Najitama, M .S.I

()

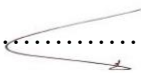
Sekretaris Sidang : Faisal, M.Ag

()

Penguji I : Dr. Imam Satibi, M.Pd.I

()

Penguji II : Dr. Sudadi, M.Pd

()


Kebumen,

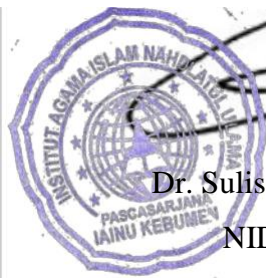
14 Juni 2021

Sekolah Pascasarjana

Institut Agama Islam Nahdatul Ulama Kebumen

Direktur.


Dr. Sulis Rokhmawanto, M.S.I
NIDN. 2131038501



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam tesis ini.

Kebumen, April 2021

Yang Menyatakan,



ASHADI

NIM 1910622

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Alloh SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan Q.S . Al-Mujadalah : 11¹

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ

“ Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan² yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya ; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Al-Ra’d: 11)²

¹.H. Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*. Jakarta 1984 ² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

1. Almamater Pascasarjana IAINU Kebumen
2. Keluarga Besar Pondok Pesantren Daarul Aitam Nurul Iman, Kuripan
Kidul, Kesugiham, Cilacap.
3. Istriku Suyanti dan 3 (ketiga) anakku Faiz Abdillah, Farhan Dhiyaulhaq dan Fatimah
Laila Faiha yang selalu mendukungku.
4. Guru-guruku sejak Madrasah Ibtidaiyah dan SD sampai Perguruan Tinggi yang telah
banyak memberikan ilmu-ilmunya.
5. Sahabat-sahabat satu profesi guru yang senantiasa menginspirasi.
6. Teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana IAINU Kebumen, yang
telah memberikan motivasi, dan dukungan moral.

ABSTRAK

ASHADI: Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren Dan Pendidikan Madrasah Di Yayasan Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan. Tesis Pascasarjana, IAINU Kebumen, 2021.

Penelitian ini didasari oleh pentingnya sistem pendidikan pesantren dan pendidikan madrasah, sehingga keduanya perlu untuk diintegrasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Integrasi; Bentuk Integrasi; dan Faktor Pendukung dan Penghambat Integrasi Sistem Pendidikan Formal dan Pendidikan Pesantren di Yayasan Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan keabsahan data menggunakan triangulasi, dan teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Proses integrasi sistem pendidikan pesantren dan madrasah di pondok pesantren Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat serta tuntutan kemajuan zaman. Pelaksanaan Integrasi Pesantren dan madrasah di Pondok Pesantren Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan adalah sesungguhnya telah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mengembangkan jati dirinya itu yaitu pertama regulasi sistem pendidikan nasional, kedua integrasi pesantren dan madrasah sebagai suatu kebutuhan masyarakat, ketiga integrasi pesantren dan madrasah karena tuntutan budaya sosial, keempat Integrasi pesantren dan madrasah ditentukan prosesnya oleh asas pemanfaatan faktor substansi dan faktor strukturalnya; *Kedua*, Bentuk-bentuk integrasi sistem pendidikan pesantren dan madrasah di Pondok Pesantren Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan yaitu: (a) program pendidikan formal dan non formal pada Pondok Pesantren Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan dilaksanakan oleh masing-masing unit pengelola pendidikan. (b) metode pengajaran dimana kiai atau Pimp.Pondok menggabungkan dua metode pengajaran baik di pesantren maupun di madrasah, dan ketiga sumber belajar yang semakin berkembang; *Ketiga*, Faktor pendukung dan penghambat integrasi sistem pendidikan pesantren dan madrasah yaitu: (a) Faktor pendukung internal dan eksternal. Pendukung internal meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, kurikulum dan pemanfaatan waktu. Pendukung eksternal meliputi berfungsinya organisasi, hubungan masyarakat luar dan kepercayaan lembaga-lembaga luar. (b) Faktor penghambat meliputi hambatan disebabkan sosial budaya dan hambatan disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana.

Kata kunci: Integrasi, Sistem Pendidikan Pesantren, dan Pendidikan Formal (Madrasah)

ABSTRACT

ASHADI: Integration of Islamic Boarding School Education Systems and Madrasah Education at the Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan Foundation. Thesis, Graduate Studies Program, IAINU Kebumen, 2021.

This research is based on the importance of the pesantren education system and madrasah education, so that the two need to be integrated. This study aims to determine the Integration Process; Form of Integration; and Supporting and Inhibiting Factors for Integration of the Formal Education System and Pesantren Education at the Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan Foundation.

This research is a qualitative research. Data collection uses interviews, observation, and documentation, and the validity of the data uses triangulation, and data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and conclusions drawing.

This study produces the following conclusions. First, the process of integrating the Islamic boarding school and madrasah education system in the Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan Islamic boarding school is motivated by the needs of the community and the demands of the progress of the times. Implementation of Islamic Boarding School and Madrasah Integration in Daarul Aitam Nurul Iman Islamic Boarding School Kesugihan has actually been influenced by various factors that can develop its identity, namely firstly the regulation of the national education system, secondly the integration of pesantren and madrasah as a community need, thirdly the integration of pesantren and madrasah due to demands social culture, fourth. The process of integrating pesantren and madrasah is determined by the principle of the use of substance and structural factors; Second, the forms of integration of the pesantren and madrasah education systems at the Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan Islamic Boarding School, namely: (a) formal and non-formal education programs at Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan Islamic Boarding School are carried out by each education management unit. (b) teaching methods in which the kiai or caregiver combines two teaching methods both in pesantren and madrasah, and the three learning resources are growing; Third, factors supporting and inhibiting the integration of the pesantren and madrasah education systems, namely: (a) internal and external supporting factors. Internal support includes human resources, facilities and infrastructure, finance, curriculum and time utilization. External support includes the functioning of the organization, external public relations and the trust of outside institutions. (b) Inhibiting factors include barriers caused by socio-culture and barriers due to limited facilities and infrastructure.

Keywords: Integration, Islamic Boarding School Education System, and Formal Education (Madrasah)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ.
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. حَسْبُ مَا بَعْدَهُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas lindungan lindungan, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar tanpa halangan yang berarti. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen, Dr. H. Imam Satibi, S.Ag., M.Pd.I. yang telah banyak membantu penulis dalam, sehingga tesis ini dapat terwujud.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen, Dr. Sulis Rokhmawanto, M.S.I.
3. Dosen Pembimbing, Dr. Sulis Rokhmawanto, M.S.I. yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Semua dosen dan staff pengelola Pascasarjana IAINU Kebumen yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan pengembangan dan pendalaman keilmuan serta layanan prima selama peneliti menempuh dan menyelesaikan studi tepat waktu.
5. Seluruh civitas Pondok Pesantren Daarul Aitam Nurul Iman Kuripan Kidul, khususnya Pimpinan Pondok Pesantren Bpk. H. Lukito Hardiman yang telah memberikan izin, informasi, dan segala fasilitas yang peneliti perlukan selama penelitian.
6. Istri dan anak-anakku yang senantiasa memberikan doa dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.
7. Teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana IAINU Kebumen, yang telah memberikan motivasi, dan dukungan moral.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Akhirnya peneliti berharap semoga berbagai amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT, dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca. *Amiin Yaa Robbal 'Alamin.*

Kebumen, April 2021

Penulis,



ASHADI

NIM 1910622

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Di dalam naskah tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia (2009:104), sebagai berikut:

1. Penulisan Huruf

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es kecil (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Ş	Es kecil dengan titik bawah
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan hà
18	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Integrasi	9
2. Sistem Pendidikan Pesantren	33
3. Sistem Pendidikan Madrasah	50
4. Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah	53
B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan	
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis atau Desain Penelitian	57
B. Tempat dan Waktu Penelitian	58
C. Subjek Penelitian	58
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Teknik Keabsahan Data	62
F. Teknik Analisis Data	
BAB IV HASIL PENELITIAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Letak Geografis Ponpes Daarul Aitam Nurul Iman	64
2. Sejarah dan Perkembangan Ponpes	67
3. Struktur Organisasi Ponpes	68
4. Visi Misi dan Tujuan Ponpes	70
5. Program-program Ponpes	75
6. Keadaan Ustadz	78
7. Keadaan Santri	78
8. Keadaan Sarana dan Prasarana	

9. Sarana Pendukung Keterampilan	80
B. Deskripsi Penelitian	
1. Proses Integrasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Madrasah di Yayasan Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan	81
2. Bentuk Integrasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Madrasah di Yayasan Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan	93
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Madrasah di Yayasan Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan	97
C. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Proses Integrasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Madrasah di Yayasan Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan	106
2. Bentuk Integrasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Madrasah di Yayasan Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan	108
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Madrasah di Yayasan Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persamaan dan perbedaan hasil penelitian.

Tabel 4.1. Struktur Organisasi Pengelola Pon. Pes. Daarul Aitam Nurul Iman.

Tabel 4.2. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pon. Pes. Daarul Aitam Nurul Iman.

Tabel 4.3. Keadaan Santri Pon. Pes. Daarul Aitam Nurul Iman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren sebagai institusi keagamaan mendapatkan momentum dalam sistem pendidikan nasional setelah keluarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan tidak hanya salah satu jenis pendidikan, tetapi sudah memiliki berbagai bentuknya seperti pendidikan diniyah, pesantren dan bentuk lain yang sejenis. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan dalam UU Sisdiknas tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan. Pesantren telah membentuk suatu sub-kultur yang secara sosio-antropologis bisa dikatakan sebagai masyarakat pesantren, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Sedangkan tujuan pendidikan keagamaan adalah terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Sebagai salah satu institusi sosial yang dibentuk masyarakat guna memenuhi kebutuhan pendidikan anggotanya, pesantren tidak bisa lepas dari logika pasar. Pesantren akan eksis (*survive*) sepanjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya masyarakat akan menarik kembali kepercayaan pendidikan keluarganya dari pesantren apabila merasa tidak dapat terpenuhi kebutuhannya di sana. Pesantren harus mampu membaca kemudian menerjemahkan kecenderungan masyarakat dalam konteks waktu sekarang maupun yang akan datang dengan indikasi tantangan yang sedang dihadapinya. Pada awalnya, pondok pesantren memang identik dengan ilmu keagamaan belaka, karena memang hanya membuka pendidikan agama seperti Madrasah

Diniyah dan kajian kitab kuning. Tetapi, seiring perkembangan waktu serta tuntutan keadaan untuk melakukan moderasi pelajaran, akhirnya saat ini banyak pondok pesantren yang juga membuka sekolah mulai tingkatan terendah yaitu Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah sampai pada sekolah tinggi. Perubahan tersebut tidak bisa dipisahkan dari tuntutan zaman. Respon Pondok pesantren yang awalnya merasa kaku atau bahkan menutup diri akan kemajuan sains dan teknologi patut diajungi jempol kebanggaan. Pondok Pesantren telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Keterbelakangan pendidikan Pesantren dari Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia selama ini bukan hanya disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan dari kemauan kekuatan politik tertentu, akan tetapi juga disebabkan oleh sikap pesantren itu sendiri (khususnya pesantren salaf) yang selama ini memang menjaga jarak agar tidak diintervensi oleh kekuasaan (Negara). Pilihan sikap pesantren seperti ini tentu memiliki alasan yang mendasar, yaitu masalah *paradigmatik* pendidikan yang tidak dapat dipertemukan antara formulasi sistem dan orientasi kurikulum pendidikan yang ditekankan oleh pemerintah dengan formulasi/orientasi yang diinginkan pesantren, sehingga terjadilah *gap-paradigmatic* antar keduanya, disamping juga alasan politis. Dalam perspektif historis, hal ini ditengarai sebagai dampak yang berkelanjutan dari warisan sejarah pada jaman penjajahan dimana pesantren ketika itu menjadi kekuatan oposisi masyarakat dalam melawan pemerintahan kolonialis, sementara sebagian pesantren (khususnya salaf) sampai saat ini (pasca kemerdekaan) masih berpandangan bahwa sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagian besar adalah warisan kolonialis, meskipun pandangan seperti ini belum tentu benar.

Dari permasalahan tersebut, kemudian muncul alternatif solusi agar keduanya (system pendidikan pondok pesantren dan sekolah formal) saling mengisi dan bersama-sama mempunyai tujuan yang sama untuk mencetak santri-santrinya menjadi manusia mempunyai keimanan, ketaqwaan dan mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tujuan undang-undang Negara Indonesia. Maka disusunlah system pondok pesantren dan

sekolah formal itu dalam bentuk integrasi. Dan dengan integrasi sistem itulah yang akan bisa menyambungkan kedua pendidikan (pesantren dan pendidikan formal). Salah satu pondok pesantren yang telah menerapkan integrasi system pondok pesantren dan sekolah formal itu adalah Pondok Pesantren Darul Aitam Nurul Iman Kesugihan.

Sekolah perlu mengembangkan gagasan yang kreatif dan inovatif untuk menghadapi tantangan tersebut. Pengembangan sekolah terpadu yang mengarahkan pada integrasi sekolah formal dan pesantren yang mengedepankan aspek akademik, religiusitas, karakter yang kokoh, tanggung jawab dan lain sebagainya bisa dijadikan sebagai alternatif.¹ Sekolah yang unggul dalam rasionalitas namun rendah dalam moralitas dan pesantren yang rendah dalam rasionalitas namun unggul dalam moralitas² bisa saling menutupi dan melengkapi satu sama lain.

Pondok Pesantren Daarul Aitam Nurul Iman Kuripan Kidul, Kesugihan, Cilacap merupakan salah satu Pondok Pesantren yang menaungi pondok pesantren yang mengintegrasikan sistem madrasah yang dalam hal ini MTs dan MA dengan sistem pondok pesantren. Dalam sistem pondok pesantren, Pondok Pesantren Daarul Aitam Nurul Iman Kuripan Kidul, Kesugihan, Cilacap mengadopsi kurikulum *Kuliyat al-Mu'allimin al-Islamiyyah* (KMI) Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Penggunaan kurikulum ini tidak lepas dari latar belakang pendidikan pimpinan pondok dan beberapa dewan ustadznya yang pernah belajar di KMI Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo.

Penggunaan kurikulum KMI yang berjenjang dari kelas 1-6 mengharuskan semua santri wajib menempuh pendidikan di PPDA Nurul Iman selama 6 tahun artinya ketika seorang siswa dari PPDA Nurul Iman telah menyelesaikan pendidikan MTs-nya, dia tidak boleh keluar pesantren tetapi

¹ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 103.

² Husniyatus Salamah Zainiyati, "Model Kurikulum Integratif Pesantren Mahasiswa dan UIN Maliki Malang", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 18 No. 1 (2014): 140

harus melanjutkan pendidikannya sampai kelas 12 MA atau kelas 6 KMI. Semua siswa diharuskan tinggal di pesantren. Ini dilakukan agar siswa memperoleh pendidikan sekolah dan pesantren secara lengkap. Ini memberi pengertian bahwa sekolah dan pesantren benar-benar bersinergi untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan.

Sistem pondok pesantren yang didalamnya termasuk kurikulum pesantren juga diwarnai kurikulum pesantren salaf. Kitab-kitab kuning khas pondok salaf seperti *Ta'limul Muta'alim*, *Lubabul Hadist*, *Safinatun Najaah*, *AlMabadil Fiqhiyyah*, *Buluughul Marom* dan *Tarhib wa Tarhib*. Gaya penerjemahan yang digunakan adalah dengan *utawi*, *iku*, *sopo*, *opo* dan lain-lain. Ini juga tidak lepas dari latar belakang pendidikan beberapa dewan ustadz seperti *Abah Aminuddin* yang pernah belajar di PP Al-Fiel Kesugihan dan *Abah Habibulloh* yang pernah belajar di PP Miftakhul Huda Rawalo.

Prestasi-prestasi yang diraih PPDA Nurul Iman cukup untuk membuat pondok ini diperhitungkan. PPDA Nurul Iman unggul di bidang bahasa baik Bahasa Indonesia maupun Bahasa Arabnya. Ini dibuktikan dengan menjuarai lomba-lomba pidato, bahkan ditahun 2021 juga bisa menjuarai Olympiade Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia tingkat Nasional dengan 2 (dua) mendali Perak dan 2 (dua) mendali Perunggu. Selain itu, lembaga ini juga menjuarai lomba-lomba pramuka. Di bidang sains, pada tahun 2018, MTs Nurul Iman menjadi juara II IPA Teritregasi dalam Kompetisi Sains Madrasah Kabupaten Cilacap dan berhak maju ketingkat propinsi Jawa Tengah. Di bidang keagamaan dan olahraga, PPDA Nurul Iman juga sering menjuarai lomba di event-event AKSIOMA (Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga) di tingkat KKM maupun Kabupaten..

Penelitian yang penulis lakukan difokuskan mengenai integrasi sistem pendidikan sekolah dan pesantren. Alasan pemilihan sistem pendidikan sebagai fokus penelitian adalah karena sistem pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan utk mencapai tujuan. Menurut Mastuhu yang di sebutkan dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Pesantren*

menjelaskan bahwa:

Sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah mencapai cita-cita bersama para pelakunya. Kerjasama antar pelaku ini didasari, dijiwai, digerakkan, digairahkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh mereka. Unsur-unsur suatu Sistem Pendidikan terdiri dari unsur organik dan unsur anorganik seperti dana, sarana, dan alat-alat pendidikan lainnya dimana antara unsur-unsur dan nilai-nilai yang ada dalam sistem pendidikan tidak bisa terpisahkan dan harus saling menyatu.³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “INTEGRASI SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DAN MADRASAH DI PONDOK PESANTREN DAARUL AITAM NURUL IMAN KURIPAN KIDUL KESUGIHAN CILACAP”.

Hal tersebut sebagai antisipasi *Output* Pesantren di Era Regulasi Pendidikan Nasional. Mengingat pondok tersebut terus berupaya mengawal, mencetak santri-santrinya menjadi santri yang mempunyai wawasan pengetahuan agama yang mendalam dan mempunyai ilmu pengetahuan dan

teknologi yang mumpuni maka perlu pendampingan khusus baik itu dari para guru, ustad bahkan santri.

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan, dan begitu kompleksnya permasalahan pendidikan yang terjadi, maka sesuai dengan judul yang diangkat, maka penulis akan memfokuskan penelitian ini dalam beberapa hal yang terkait dengan judul.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah di Pondok Pesantren Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan?
2. Bagaimana Bentuk Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah di Pondok Pesantren Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan?

³Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS XX

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah di Pondok Pesantren Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan?

C. Tujuan Penelitian

Secara substansial, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui integrasi sistem pendidikan pesantren dan madrasah di Pondok Pesantren Daarul Aitam Nurul Iman Kesugihan; dalam hal apa saja integrasi itu dilakukan; dan sejauh mana hasil integrasi tersebut. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses terjadinya integrasi tersebut dalam bentuk karya ilmiah yang berupa laporan penelitian, sehingga menjadi referensi bagi semua pihak dalam meningkatkan *output* pesantren di era regulasi pendidikan nasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan khazanah keilmuan dalam dimensi pendidikan pesantren di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dalam meningkatkan dinamika dan pembaharuan pesantren dan dalam meningkatkan sumber daya manusia, khususnya umat Islam.
2. Secara praktis
 - a. Bagi pemerintah, memberikan tawaran dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Nasional yang selama ini belum mampu mencetak lulusan yang berilmu dan beriman.
 - b. Bagi IAINU Kebumen, menyumbangkan pemikiran tentang konsep kurikulum terpadu dalam suatu lembaga.
 - c. Bagi pesantren.

Memberikan kontribusi dalam usaha pencapaian optimalisasi pendidikan di pondok pesantren dan merumuskan serta

mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pondok pesantren.

d. Bagi Pimp.Pondok.

Memberikan kontribusi dalam upaya mengembangkan sistem pesantren yang tidak meninggalkan budaya lama dan tidak ketinggalan dengan pembaharuan sistem pendidikan yang menjadi tuntutan formal bagi kehidupan santri.

e. Bagi santri.

Memberikan kontribusi dalam mengembangkan pola pikir dan kemampuan santri dalam mengembangkan keilmuan baik yang bercorak salaf maupun khalaf.

f. Bagi peneliti, menjadi acuan atau setidaknya menjadi referensi tentang lembaga pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum sekolah formal dan pesantren.

g. Bagi pembaca, menjadi bahan kajian lebih lanjut mengenai tawaran kurikulum terpadu.

h. Bagi Masyarakat umum, memberikan referensi tentang lembaga pendidikan Islam integratif yang bisa dijadikan pilihan dimana anaknya menempuh pendidikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Integrasi

Pengertian Integrasi berasal dari bahasa Inggris “*integration*” yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.⁴ Secara harfiah integrasi berlawanan dengan perpisahan, suatu sikap yang meletakkan tiap-tiap bidang dalam kotak-kotak yang berlainan.⁵ Integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan, atau penggabungan, dari dua objek atau lebih. Sebagaimana dikemukakan oleh Poerwandarminta, yang dikutip Trianto, bahwa integrasi adalah penyatuan supaya menjadi satu atau kebulatan yang utuh.⁶

Integrasi menurut Sanusi adalah suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai. Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan jalinan hubungan yang erat, harmonis dan mesra antara anggota kesatuan itu.⁷

Istilah integrasi dapat dipakai dalam banyak konteks yang berkaitan dengan hal pengaitan dan penyatuan dua unsur atau lebih yang dianggap berbeda, baik dari segi sifat, nama jenis dan sebagainya.

Integrasi mempunyai arti menjadikan satu, penyatuan, penggabungan, atau memadukan (dari yang pecah-pecah/ terpisah-pisah). Adapun yang dimaksud integrasi dalam penelitian

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 2007). h. 437

⁵ Zainal Abiding Bagir, *Integrasi Ilmu Dan Agama*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010) 2010.

⁶ Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007) 2017.

⁷ Novianti Muspiroh, *Integrasi Nilai Islam Dalam Pembelajaran IPA*, *Jurnal Kebijakan Pendidikan* Vol. Xxviii No. 3. 2013/1435 9

ini adalah penyatuan model pendidikan yaitu antara pendidikan pesantren dan pendidikan Madrasah.

2. Sistem Pendidikan Pesantren

a. Pengertian Sistem

Pemikiran sistem pada saat ini telah digunakan oleh berbagai kalangan secara luas. Hal ini antara lain didorong oleh kesadaran bahwa setiap gejala atau fenomena di bidang tertentu hampir tidak dapat dipisahkan dengan bidang itu sedemikian eratnyanya, sehingga kadang-kadang sulit untuk menemukan pokok pangkal dari masalah (akar masalah). Sebagai contoh adalah pertikaian antar kelompok masyarakat yang terjadi di Ambon, Poso dan Palu; walaupun yang muncul kepermukaan adalah gangguan masalah keamanan, tetapimasaalah sebenarnya yang menjadi penyebab (akarmasalah) yang perlu dicari, yaitu apakah kelompo, suku, etnis, ataukah agama. Disinilah perlunya melihat masalah sebagai satu keseluruhan, bukan sebagian-sebagaian secara terpisah. Cara pandang semacam ini merupakan cikal bakal dari cara pandang sistem. Contoh lain juga terjadi di dunia pendidikan, misalnya rendahnya tingkat pendidikan Indonesia di mata dunia Internasional. Kelemahan SDM dijelaskan oleh banyak kalangan sebagai akar masalah dalam hal ini. Tetapi kemudian masalah yang sebenarnya justru perlu dikaji lagi, yaitu apakah perhatian pemerintah kurang, sarana prasarana yang tidak memadai, kurangnya pemerataan SDM terampil, atau bisa juga karena buruknya lingkungan dan budaya yang ada. Pendekatan sistem perlu digunakan dalam hal ini untuk mendapatkan jawaban yang valid, yaitu dengan melihat masalah secara satu kesatuan menyeluruh, tidak secara terpisah atau parsial.

Istilah sistem merupakan konsep yang abstrak. Karena bersifat abstrak, banyak para ahli atau lembaga yang memberikan definisi tentang sistem dengan sudut pandang masing-masing. Misalnya, Jhonson, Kast dan Rosenzweig dalam Salamoen yang mendefinisikan:

“Sistem adalah suatu keseluruhan yang terorganisasi atau kompleks, suatu golongan atau kombinasi dari berbagai hal atau bagian, yang membentuk suatu kesatuan.”⁸

Dalam karyanya Teori Sistem, Amirin menyusun unsur-unsur definisi sistem dalam membentuk pertanyaan untuk mempermudah pemahaman, yaitu:

- (1) Apa sajakah unsur-unsur sistem itu? (2) apakah tujuan sistem itu? (3) apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu? (4) apa sajakah yang diperoleh oleh sistem itu? (5) apa yang dihasilkan (output) proses itu? (6) apa ukuran keberhasilan proses tersebut?.

Von Bertalanffy, seorang biolog dan filosof, memberikan definisi, yang walaupun diakuinya terlalu umum dan samar, yaitu

“*sets of elements standing in interrelation*” (rangkaian-rangkaian terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan).¹⁰

Ada pula pakar yang memberikan definisi berdasarkan kelengkapan criteria sebuah sistem, seperti yang diutarakan oleh Bulizuar Buyung, bahwa sesuatu dapat disebut sistem apabila memenuhi criteria berikut:

- (1) Terdiri dari unsure, elemen atau bagian, (2) elemen- elemen, unsure-unsur atau bagian-bagian itu satu sama lain jalin-menjalin, pengaruh-mempengaruhi; terjadi interaksi dan interdependensi (3) keseluruhannya terpadu menjadi kesatuan yang utuh, suatu totalitas, (4) kesatuan itu mempunyai tujuan, fungsi atau output tertentu.¹¹

⁸ Darwin Syah, *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 45

⁹ Nasuka, *Teori Sistem: Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 17

¹⁰ Ludwig Von Bertalanffy, *General System Theory*, (New York, George Braziller, 1975), hlm. 38. Dalam Nasuka, *Teori Sistem: ... Op. Cit.*, hlm. 17.

¹¹ Bulizuar Buyung, *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Karunika, 1986), hlm. 4-5.

Hal yang senada diungkapkan oleh ketiga pakar berikut mengenai definisi sistem. Menurut Ermaya pengertian sistem adalah keseluruhan yang menyangkut bagian-bagian yang mempunyai hubungan, baik langsung maupun tidak langsung satu dengan yang lainnya yang merupakan totalitas tertentu. Rusadi dalam karyanya *Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial* memberikan pengertian sistem sebagai kesatuan (*unity*) yang terdiri dari bagian-bagian (*parts, components, elements, secondary-systems, subsystems*) yang secara fungsional terkait satu sama lain dalam ikatan superiordinatnya yang menunjukkan satu gerak dalam rangka mencapai satu tujuan tertentu.

Dengan memperhatikan berbagai definisi mengenai sistem yang ditawarkan oleh para ahli akan tampak bahwa definisi yang ada tidak akan terlepas dari sifat dan ciri sistem, yaitu: interdisipliner, interdependensi antara unsur/ elemen (ketergantungan antar unsur) sehingga merupakan kesatuan yang utuh (*unity*), serta adanya tujuan yang hendak dicapai. Dari berbagai pengertian yang ada perbedaannya hanyalah pada penekanan-penekanan dan susunan kalimatnya. Sedangkan inti pengertian tetap bertumpu pada sifat-sifat dan ciri-ciri sistem.

b. Batas Sistem

Batas merupakan pemisah dua bagian atau daerah. Dengan adanya batas sistem, maka luas atau besarnya sistem menjadi jelas. Berbicara tentang batas-batas sistem, Rusadi berpendapat bahwa karena sistem berkenaan substansi tertentu (baik materiil maupun immaterial dan juga mempunyai batas-batas (*boundaries*), serta mempunyai pula garis limit terluar (*periphery*) yang langsung berbatasan dengan sistem-sistem lainnya (*related system*), kondisi, waktu, dan juga kepentingan pandangan serta intensi pemakai/pembuat sistem, maka batas-batas sistem itu bisa tetap (*contract*), berkembang (*expanding*), dan bahkan sekali-kali merambah ke bidang

sistem lain (*encroaching*).¹²

Dengan demikian jelas bahwa batas sebuah sistem bersifat kenyal (*fleksibel*), dalam pengertian bahwa batas tersebut bisa. Perubahan batas itu dipengaruhi oleh kondisi dan kebutuhan untuk mempertahankan hidup ataupun pengembangan sistem. Perluasan dalam sistem makin banyak dan makin jelas. Keadaan sebaliknya bila unsur-unsur detali di dalam sistem makin sedikit dan makin tidak jelas, maka akan terjadi penciutan (*kontraksi*) batas-batas sistem; dua buah gambar berikut riil menjelaskan tentang *ekspansi* dan *kontraksi* batas-batas sistem. Tetap (*defensi*), meluas (*berekspansi*) atau menciut (*berkontraksi*).

c. Klasifikasi Sistem

Sistem dapat diklasifikasikan berdasarkan kepada: wujudnya, asal-usul proses terjadinya, pengaruh terhadap sistem lain, serta berdasarkan jumlah komponen sistemnya.¹³

Berdasarkan wujudnya, sistem dibedakan menjadi *sistem konkrit/ fisik* dan *sistem abstrak/ sosial*. Sistem konkrit atau fisik adalah sistem yang nyata dapat dilihat wujudnya, bentuk, ukuran, warna, serta cirri lainnya: seperti rumah, mobil, gunung, laut, sungai dan sebagainya. Sedangkan sistem abstrak atau sosial merupakan sistem yang tidak dikenal cirri-cirinya baik bentuk, warna dan cirri-ciri lainnya seperti: sisten politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan sebagainya.

Berdasarkan asal-usul proses terjadinya, sistem dibedakan menjadi *sistem alami* dan *sistem buatan*. Sistem alami adalah sistem yang terjadi secara alami dengan sendirinya, dan tidak dapat dirancang oleh manusia dan merupakan kuasa Allah Tuhan Yang

¹² Nasuka, *teori sistem: ... op. cit*, hlm. 23.

¹³ Darwin Syah, *Perencanaan Sistem Pengajaran... Op. Cit.*, hlm. 46-48.

maha Esa, seperti manusia, hewan, gunung, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Sedangkan sistem buatan adalah sistem yang sengaja dirancang dan dibuat oleh manusia dan proses terjadinya semua dikuasai oleh manusia, seperti mobil, kereta api, rumah, administrasi, ekonomi, politik, serta pendidikan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan jumlah komponen sistemnya, sistem dibedakan menjadi *sistem kompleks* dan *sistem sederhana*. Sistem kompleks adalah sistem yang memiliki sub sistem cukup bahkan banyak, dan antara sub sistem yang satu dengan yang lain saling terkait dan saling mempengaruhi cukup bahkan sangat banyak. Sedangkan sistem sederhana adalah sistem yang memiliki sub sistem sedikit, dan antara sub sistem yang satu dengan yang lain terkait dan saling mempengaruhi juga sedikit.

Berdasarkan pengaruhnya terhadap sistem lain, sistem terbagi menjadi *sistem tertutup* dan *sistem terbuka*. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak peka/ tidak terpengaruh oleh/ terhadap sistem lainnya serta tidak bereaksi terhadap sistem lain ketika terjadi

interaksi. Contoh lain sistem tertutup adalah: gedung, meja, kursi, dan sebagainya.

Sedangkan sistem terbuka merupakan sistem yang sangat peka/ terpengaruh oleh/ terhadap sistem lainnya serta bereaksi terhadap sistem lain ketika terjadi interaksi. Dan ketika berinteraksi

dengan sistem lain mengalami perubahan-perubahan. Sistem terbuka bersifat dinamis, berkembang serta mengalami penyempurnaan secara terus menerus. Komponen sistem terbuka

bisa terdiri dari sistem tertutup maupun sistem terbuka, misalnya: sistem pendidikan: terdiri dari komponen guru, siswa, strategi, dan evaluasi dan tujuan (merupakan sistem terbuka) serta sarana prasarana, media dan alat pembelajaran (komponen sistem tertutup).

d. Faktor-faktor penyusunan sistem

Faktor adalah berbagai hal, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan ataupun mempengaruhi terjadinya sesuatu.

Keseluruhan faktor-faktor perlu diperhatikan dalam penyusunan sistem, agar sistem berjalan sesuai yang direncanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- 1) Komponen/ elemen/ unsur/ subsistem sebagai masukan (input)
Bagian dari sistem bisa disebut komponen, elemen, unsure, ataupun subsistem. Sejauh ini belum ada criteria yang jelas tentang penggunaan istilah tersebut ada yang berpendapat bahwa bila bagian dari sistem itu cukup besar, maka disebut subsistem, kemudian berturut-turut komponen, elemen, dan unsure. Dapat dijelaskan bahwa bagian-bagian itu saling terkait dan terjalin satu sama lain; hal ini disebabkan oleh adanya fungsi-fungsi tertentu yang melekat padanya. Dalam sistem sosial, penjalinan fungsi-fungsi itu dimaksudkan untuk mempertahankan kehidupan sistem tadi. Seperangkat komponen yang terikat dan berhubungan satu sama lain dapat disebut sebagai struktur. Suatu sistem dapat hidup dalam suatu sistem yang lebih besar lagi (suprasistem), dan pada situasi tertentu data terdiri dari sejumlah subsistem sebagai anggotanya. Salah satu cara yang cukup sederhana untuk mengidentifikasi input software.
- (2) peranti otak/ unsure manusia/ brainware; dan
- (3) peranti keras/ dukungan sumber daya.¹⁴ Sistem tertentu selalu merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang disebut Supra Sistem.

b. Pengertian Pesantren

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama yang mana para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari seorang

¹⁴ Nasuka, *Teori sistem: ... op. cit*, hlm. 28.

atau beberapa orang kyai dengan ciri khas bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.¹⁵ Pesantren dapat didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pada pelajaran agama Islam dengan didukung adanya asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen.

Pesantren memiliki ciri khas kehidupan dan pendidikan yaitu pemberian metode, struktur dan literatur tradisional, baik berupa pendidikan formal di madrasah dengan jenjang pendidikan yang bertingkat-tingkat, maupun dengan sistem halaqah dan sorogan yang ciri utama dari pengajaran ini adalah penekanan terhadap pemahaman secara harfiah atas suatu kitab tertentu. Hal ini akan mengakibatkan daya analisa para santri menjadi rendah. Ciri khas berikutnya dapat dilihat pada pemeliharaan nilai tertentu yang mungkin lebih mudah disebut dengan subkultur pesantren. Tata nilai dan subkultur yang dimaksud adalah penekanan pada nilai ibadah terhadap kegiatan yang dilakukan santri, termasuk taat dan memuliakan guru yang merupakan sarana untuk memperoleh pengetahuan agama yang hakiki.¹⁶

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khas tersendiri dan membedakan dengan lembaga pendidikan lainnya. Pesantren yang menonjol dengan pengajian kitab klasik dengan misi meningkatkan keimanan, ketakwan, dan akhlak mulia memberikan sumbangan yang sangat besar dalam mendidik moral anak bangsa sejak masa penjajahan hingga saat ini.

Setiap pesantren berkembang dan berproses dengan cara yang berbeda-beda baik dari segi metode maupun kegiatan kurikulumnya, namun dengan perbedaan tersebut masih dapat ditemukan adanya pola yang sama diantaranya dapat dibedakan dalam dua segi yaitu segi fisik dan nonfisik. Dari segi fisik ada empat komponen yang selalu melekat

¹⁵ Mujammil Qomar, *Pesantren: dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 2.

¹⁶ Azhari, "Eksistensi Sistem Pesantren Salafi Dalam Menghadapi Era Modern", *Islamic Studies Journal*, Vol. 2, No. 1 (2014), hlm. 55.

pada setiap pondok pesantren yaitu; a) Kyai sebagai pemimpin, pendidik, dan panutan. b) Santri sebagai peserta didik. c) Masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta peribadatan. d) Pondok sebagai tempat mukim santri. Dari segi nonfisik adalah pengajian atau pengajaran agama dengan berbagai metode yang secara umum hampir seragam.¹⁷

Pesantren merupakan hasil usaha mandiri kyai yang dibantu santri dan masyarakat, sehingga memiliki berbagai bentuk yang selama ini cukup sulit terjadi penyeragaman dalam skala nasional. Setiap pesantren memiliki ciri khusus akibat perbedaan kyai dan keadaan sosial budaya maupun sosial geografis yang mengelilinginya.¹⁸

Pesantren seiring dengan perkembangan zaman mengalami perubahan dengan adanya pesantren modern yang begitu banyak, namun tidak mengurangi dan menghilangkan tradisi lama bahkan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pesantren dari masa ke masa selalu memiliki fungsi utama sebagai tempat *tafaqquh fiddin*, walaupun secara empiris bentuk bangunan dan metode pembelajaran mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Pada dasarnya pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dilaksanakan dengan sistem pondok dengan kyai sebagai tokoh sentralnya dan masjid sebagai pusat lembaganya. Potret pesantren dapat dilihat dari berbagai segi sistem pendidikan pesantren secara menyeluruh meliputi materi pembelajaran, metode pengajaran, prinsip-prinsip pendidikan, sarana dan tujuan pendidikan pesantren, kehidupan kyai dan santri serta hubungan keduanya.¹⁹

¹⁷ Abd. Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), hlm. 37.

¹⁸ Mujammil Qomar, *Pesantren: dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi ...*, hlm. 16.

¹⁹ Sulthon Masyhud dan Khusnurdilo, Moh. *Manajemen Pondok Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), hlm. 88.

b. Karakteristik Pendidikan di Pesantren

Keberadaan pesantren diperkuat dengan tradisi keilmuannya yang integral. Pada masanya, integralitas itu dapat dilacak pada pengembangan fiqh dan alat-alat bantu yang disatukan dengan fiqh sufistik. Dengan kata lain yang diutamakan dalam pesantren bukan hanya aspek pengamalan hukum atau aspek akhlak semata, melainkan juga pemekaran pengertian tentang kehidupan dan hakikat manusia serta kehidupan masyarakat.²⁰

Di kalangan para santri masih berlaku budaya *tawadu'* dan mohon doa restu dari san kyai. Meskipun para santri memiliki pilihan untuk mengekspresikan nilai-nilai reformatif dan transformatif, mereka tidak bisa melepaskan diri dari identitas budaya santri yang ikhlas, *tawadu'*, *zuhd*, dan *wara'*.²¹

Dengan budaya tersebut mereka meletakkan kyai pada posisi yang harus dihormati. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik dan sulit didefinisikan secara sempurna, akan tetapi kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri pendidikan pesantren. Ciri-ciri tersebut yaitu:

- 1) Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kyainya. Kyai sangat memperhatikan santrinya.
- 2) Kepatuhan santri kepada kyai. Para santri menganggap bahwa menentang kyai, selain tidak sopan juga dilarang agama.
- 3) Hidup hemat dan sederhana benar-benar diwujudkan dalam lingkungan pesantren.
- 4) Kemandirian amat terasa di pesantren. Para santri mencuci pakaian sendiri, membersihkan kamar tidurnya sendiri dan memasak sendiri.
- 5) Jiwa tolong-menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pesantren.
- 6) Disiplin sangat dianjurkan untuk menjaga kedisiplinan ini pesantren biasanya memberikan sanksi-sanksi edukatif.
- 7) Kehidupan dengan tingkat religius yang tinggi, berani menderita untuk mencapai tujuan.²⁶

²⁰ A'la, Abd. *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm.18.

²¹ Aly, Abdullah. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.169.

²⁶ Masyhud, M. Sulthon dan Khusnuridlo, Moh. *Manajemen Pondok Pesantren ...* , hlm.63-64.

Ciri-ciri di atas biasanya masih dipertahankan oleh pesantren, karena hal itu merupakan cirikhas dari sebuah pesantren yang sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dan keikhlasan akan tetapi tetap dalam koridor etika-etika pesantren.

Ponpes atau pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang bersistem asrama (Jawa: pondok). Di mana santri (pelajar) tinggal di dalam asrama (hostel) selama masa belajar tanpa diijinkan untuk pulang ke rumahnya kecuali saat musim libur.

Pendidikan pesantren berlangsung 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dari sekian banyak Pondok Pesantren masing-masing mempunyai ciri khas dan menjadikan pondok pesantren tersebut menjadi karakter pondok pesantren dengan sebutan pondok pesantren salaf/salafiyah, pondok pesantren modern, pondok pesantren kombinasi dan pondok pesantren salafi.

Secara sederhana definisi Pondok Pesantren Salaf/Salafiyah adalah sebuah pesantren yang menganut sistem tradisional di mana di dalamnya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan sama sekali tidak mengajarkan ilmu umum. Kata salaf/salafiyah dalam pengeritan pesantren di Indonesia dapat dipahami dalam makna literal dan sekaligus terminologis khas Indonesia. Secara literal, kata salaf/salafiyah dalam istilah pesantren adalah kuno, klasik dan tradisional sebagai kebalikan dari pondok modern, kholaf atau ashriyah.

Secara terminologi sosiologis, pesantren salaf/salafiyah adalah sebuah pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama saja kepada para santri. Atau, kalau ada ilmu umum, maka itu diajarkan dalam porsi yang sangat sedikit. Umumnya, ilmu agama yang diajarkan

meliputi Al-Quran, hadits, fikih, akidah, akhlak, sejarah Islam, faraidh (ilmu waris Islam), ilmu falak, ilmu hisab, dan lain-lain. Semua materi pelajaran yang dikaji memakai buku berbahasa Arab yang umum disebut dengan kitab kuning, kitab gundul, kitab klasik atau kitab tuots. Pesantren salaf murni, disebut juga dengan salafiyah, memang bertujuan untuk mencetak ulama ahli agama. Saat ini, pesantren salaf murni tidak banyak. Berikut beberapa di antaranya: Ponpes Sidogiri Pasuruan, Jatim, Ponpes Langitan Tuban, Jatim, Ponpes Lirboyo Kediri, Jatim, Ponpes Ploso, Kediri, PP Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jateng, Pesantren Cidahu, Pandeglang, Banten dan lain sebagainya.

Sedangkan Pondok Pesantren Modern adalah anti-tesa dari pesantren salaf. Sistem ini dipopulerkan pertama kali oleh Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang kemudian diduplikasi di pesantren lain yang memakai label modern. Pondok Modern disebut juga dengan pesantren kholaf (modern) sebagai akronim dari salafatau *ashriyah*. Pesantren yang di dalamnya menganut sistem pendidikan yang diadopsi dari sistem pendidikan modern dan materi yang dipelajari merupakan kombinasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ciri khas pondok modern adalah umumnya memakai sistem klasikal, ilmu umum dan agama sama-sama dipelajari, penekanan pada kemampuan berbahasa asing Arab dan Inggris percakapan/lesan, lebih disiplin dan lebih agresif, belajar mandiri dan berorganisasi.

Sedangkan Pondok Pesantren Kombinasi Salaf dan Modern saat ini, umumnya pesantren yang dulunya salaf murni sudah beradaptasi dan mengkombinasikannya dengan sistem modern dalam arti ada pendidikan formal dan sistem pembelajaran bahasa Arab atau Inggris aktif di samping pendidikan kitab kuning. Beberapa pesantren kominasi ini ada yang berhasil tetap mempertahankan sistem salafnya

yakni kemampuan membaca kitab kuning, namun tidak sedikit yang kalah sama sistem modernnya di mana santri hanya bisa berbicara bahasa Arab, tapi kesulitan memahami kitab gundul. Berikut beberapa di antaranya: Pesantren Al-Khoirot Malang, Jatim, Pesantren Bata- bata Pamekasan, Madura, Pesantren Salafiyah Sukorejo, Situbondo, Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Pesantren Buntet, Cirebon, Pesantren Purba, Sumatera Utara, Pesantren Al-Khairaat, Sulawesi dan lain sebagainya.

Pesantren Salafi Wahabi (sawah), ciri khas yang paling mudah diketahui dari ponpes Wahabi adalah: tidak ada qunut saat shalat subuh, dan tidak ada tahlilan pada malam Jumat serta tidak ada materi pelajaran tasawuf dan tauhid Asy'ariyah atau Maturidiyah. Istilah Salafi ada dua macam. Pertama, Salafi sebagai sinonim dari salaf atau salafiyah. Sebagian pesantren NU juga memakai istilah Salafi. Kedua, salafi sebagai gerakan yang dikampanyekan oleh kelompok Islam tertentu yang bernama gerakan Wahabi. Pesantren Salafi dengan makna kedua ini berbeda jauh dengan pesantren salaf (tanpa 'i') atau salafiyah. Keduanya berbeda jauh bagaikan langit dan bumi. Pesantren Wahabi Salafi adalah pesantren yang akidahnya menganut ideologi Wahabi Arab Saudi. Akan tetapi mereka lebih suka menyebut dirinya dengan Pesantren Salafi, bukan Pesantren Wahabi. Atau, Salafi Wahabi. Itulah sebabnya banyak kalangan muslim NU (Nahdlatul Ulama) yang merasa tertipu ketika masuk ponpes Wahabi Salafi yang dikira berfaham salaf atau salafiyah tapi ternyata berfaham Wahabi. Kalau pesantren salaf lebih terkait dengan metode pendidikan yang berada di sebuah pesantren, sedangkan Pesantren Salafi lebih bermakna sebuah pesantren yang berideologi Wahabi atau Wahabi Salafi. Masalah qunut adalah masalah khilafiyah dalam madzhab empat. Tahlil adalah tradisi tiap malam Jumat yang biasa dilakukan kalangan Aswaja An-Nahdliyah. Yang tidak melakukan ini bahkan

mengecamnya adalah kalangan Wahabi dan/atau ormas yang berafiliasi dengannya.

Sistem pendidikan yang dianut pada pesantren Salafi umumnya sistem modern dalam arti memberlakukan pendidikan formal dari Playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Walaupun ada juga program Tahfidz Al-Quran di sebagian pesantren salafi seperti Al-Bukhori Solo. Daftar Pesantren Salafi Wahabi, berikut beberapa Pesantren Wahabi : Ma'had Imam Bukhori Solo, Ma'had Al-Ukhuwah Sukoharjo, Ma'had Ibnu Abas Sragen, Ponpes Islam Al-Irsyad Semarang dan lain sebagainya.

c. Komponen dan Sistem Pendidikan Pesanten

Berdasarkan latar belakang didirikannya suatu pesantren dapat dilihat dari tujuan utamanya yaitu untuk mendalami ilmu-ilmu agama dan diharapkan santri yang keluar dari pesantren telah memahami beraneka ragam mata pelajaran agama dan kemampuan merujuk kepada kitab-kitab klasik. Ada dua komponen dalam pondok pesantren yaitu elemen pondok pesantren dan system pendidikan pondok pesantren.

1. Elemen pondok pesantren meliputi , pondok, masjid, kyai, santri dan pengajian kitab-kitab klasik.

a. Pondok

Istilah pondok berasal dari bahasa Arab funduq yang berarti tempat bermalam, pondok juga diartikan asrama. Dengan demikian, pondok mengandung makna sebagai tempat tinggal. Sebuah pesantren semestinya memiliki asrama sebagai tempat tinggal santri.²³

Ada beberapa alasan utama pentingnya pondok dalam satu pesantren yaitu banyaknya santri yang berdatangan dari daerah

²³Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan di Indonesia*, h 64.

yang jauh untuk menuntut ilmu, dan pesantren biasanya terletak di daerah yang tidak tersedia perumahan untuk menampung santri yang berdatangan dari jauh.

b. Masjid

Masjid merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren. Masjid sebagai tempat yang paling strategis untuk mendidik para santri seperti praktek salat berjamaah lima waktu

dan pengajian kitab-kitab klasik.²⁴

Seperti yang dikemukakan di atas, masjid memiliki fungsi ganda, selain sebagai tempat salat dan ibadah juga sebagai tempat pengajian terutama yang masih menggunakan metode sorogan dan wetonan (bandongan). Posisi masjid di kalangan pesantren memiliki makna tersendiri khususnya tempat untuk mendidik dan mengajar santri. Dalam konteks pesantren, masjid dan kiai dua hal yang memiliki keterkaitan Perat satu dengan lainnya. Di tempat inilah hubungan santri dan kiai dirajut bukan hanya dalam bentuk transmisi ilmu-ilmu Islam, namun juga membentuk hubungan emosional antara kiai dan santri yang pada akhirnya berbuah pada penghormatan tulus santri kepada sang kyai.

c. Kyai

Kyai merupakan tokoh pusat dalam sebuah pesantren. Kyai adalah salah satu elemen yang paling esensial dari satu pesantren, sebab bermula pada interaksi kiai dengan orang yang menimba ilmu dengannya maka berangsur-angsur akan menjadi besar dan berlanjut pada dibangunnya masjid, pondok sehingga memenuhi keseluruhan elemen pesantren. Kyai tidak hanya sebagai penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga sosok cerminan dari nilai yang hidup di

²⁴ Abd. Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*, h. 40

lingkungan komunitas santri. Kedudukan dan pengaruh kiai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kiai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup di lingkungan santri.²⁵ Kyai sebagai guru atau pendidik utama di pesantren sebab kiai bertugas memberikan bimbingan, pengarahan, dan pendidikan kepada para santri. Kiai merupakan figur ideal santri dalam proses pengembangan diri, meskipun pada

d. Santri

Santri merupakan peserta didik yang menuntut ilmu atau objek pendidikan di pesantren. Santri di pesantren digolongkan dalam dua kelompok yaitu santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah santri yang datang dari tempat yang jauh dan tidak memungkinkan bagi santri tersebut untuk pulang ke rumahnya sehingga dia harus tinggal di pesantren. Santri kalong adalah santri berasal dari daerah sekitar pesantren sehingga memungkinkan bagi santri tersebut untuk kembali ke tempat tinggalnya.²⁶

e. Pengajian Kitab-Kitab Klasik

Kitab-kitab klasik lebih populer disebut dengan kitab kuning yaitu kitab yang ditulis oleh ulama Islam pada zaman pertengahan. Kepintaran dan kemahiran seorang santri dapat diukur dari kemampuannya membaca serta menjelaskan isi kitab tersebut. Kriteria kemampuan membaca kitab sebagai syarat utama diterima atau tidaknya seorang sebagai ulama atau kiai bukan hanya berlaku pada zaman dulu saja, namun hal itu berlaku sampai saat ini. Begitu tinggi posisi kitab-kitab klasik

²⁵Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h. 55.

²⁶Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan di Indonesia*, h

tersebut sehingga setiap pesantren selalu mengadakan pengajian kitab-kitab klasik, walaupun telah banyak pesantren memadukan pelajaran umum namun tetap diadakan pengajian kitab-kitab klasik.²⁷

2. Komponen sistem pendidikan di pesantren meliputi: pelaksana pendidikan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, manajemen pondok pesantren, dan tujuan pondok pesantren.

1) Pelaksana Pendidikan

Pelaksana pendidikan di pesantren meliputi kyai, Pimp.Pondok/pendidik dan peserta didik/santri. Kyai merupakan pusat kepemimpinan di pesantren. Kyai dan Pimp.Pondok/pendidik merupakan pihak yang menjalankan pendidikan serta mentransferkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik/santri dalam lingkungan pesantren, selain memberikan ilmu juga membimbing serta membentuk kepribadian peserta didik/santri di pesantren. Peserta didik/santri merupakan penerima ilmu dari pendidik/Pimp.Pondok serta pihak yang terdidik dalam lingkungan pesantren.

2) Materi Pembelajaran

Pada dasarnya pesantren hanya mengajarkan ilmu dengan sumber kajian atau mata pelajaran kitab-kitab yang ditulis dalam berbahasa Arab. Sumber-sumber tersebut mencakup al-Quran beserta tajwid dan tafsirnya, fiqh dan ushul fiqh, hadis dan musthalah al-hadis, bahasa Arab dengan seperangkat ilmu alatnya, seperti *nahwu*, *sharaf*, *bayan*, *ma'ani*, *badi'*, *manthiq*, dan *tasawuf*. Sumber-sumber kajian ini biasa disebut dengan kitab kuning.²⁸

67. ²⁷Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan di Indonesia*, h

²⁸Sulthon Masyhud dan Khusnurdilo, Moh. *Manajemen Pondok Pesantren ...*, hlm. 89.

Materi pelajaran dalam kalangan pesantren lebih dikenal dibanding istilah kurikulum, namun untuk pemaparan dalam kegiatan yang lebih baik yang berorientasi pada pengembangan intelektual, keterampilan, pengabdian tampaknya lebih tepat digunakan istilah kurikulum. Adapun kurikulum yang dimaksudkan adalah segala sesuatu usaha yang ditempuh sekolah untuk mempengaruhi atau menstimulasi belajar, baik berlangsung di dalam kelas maupun diluar kelas.²⁹

Ketika pembelajaran masih berlangsung di langgar atau masjid, materi pelajaran masih berpusat pada tiga inti ajaran Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan. Penyampaian tiga komponen tersebut dalam bentuk yang paling mendasar sebab disesuaikan dengan tingkat intelektual dan kualitas keberagaman pada saat itu. Peralihan dari langgar atau masjid dan berkembang menjadi pondok pesantren ternyata membawa perubahan pada materi pelajaran, dari sekedar pengetahuan menjadi ilmu. Dalam perkembangan selanjutnya santri bukan hanya diberikan ilmu-ilmu yang terkait dengan ritual keseharian yang bersifat praktis pragmatis melainkan ilmu-ilmu yang menggunakan penalaran yang menggunakan referensi wahyu dan bahkan ilmu-ilmu yang menggunakan cara pendekatan yang tepat kepada Allah seperti ilmu tasawuf.

Pada perkembangan selanjutnya kurikulum pesantren berkembang dan bertambah luas lagi dengan penambahan ilmu-ilmu yang masih merupakan elemen dari materi pelajaran yang diajarkan pada awal pertumbuhannya. Beberapa laporan mengenai materi pelajaran tersebut yaitu al-Quran dengan tafsir dan tajwidnya, ilmu kalam, fiqih, qawaid al fiqh, hadis dan mushthalah hadis, bahasa Arab dan ilmu alatnya seperti nahwu,

²⁹ Mujammil Qomar, *Pesantren: dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi ...* , hlm. 108.

sharaf, bayan, arudh, ma'ani, tarikh, mantiq , tasawuf, dan akhlak.

Tidak semua pesantren mengajarkan ilmu tersebut secara ketat namun kombinasi ilmu tersebut lazimnya ditetapkan di pesantren.³⁰

Jenjang pendidikan dalam pesantren tidak dibatasi seperti dalam lembaga-lembaga pendidikan yang menggunakan sistem klasikal. Umumnya kenaikan tingkat seorang santri didasarkan pada isi mata pelajaran tertentu ditandai dengan tamat dan bergantinya kitab yang dipelajarinya. Apabila seorang santri telah menguasai satu kitab atau beberapa kitab dan telah lulus maka santri tersebut akan berpindah kitab tidak berdasarkan pada usia namun pada penguasaan kitab-kitab tertentu yang telah ditetapkan dari yang terendah hingga yang paling tinggi.

3) Metode Pembelajaran

Dalam mengajarkan kitab-kitab klasik/kontemporer seorang kyai menempuh metode-metode berikut:

- a) Metode wetonan adalah metode pembelajaran yang mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai. Kyai membacakan kitab yang dipelajari saat itu, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan.
- b) Metode Sorogan merupakan metode pembelajaran dengan cara santri menghadap guru satu persatu dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Kitab-kitab yang dipelajari itu diklasifikasikan berdasarkan tingkatantingkatan, ada tingkat awal, menengah. Metode sorogan sedikit berbeda dengan wetonan yang mana santri menghadap guru satu persatu dengan membawa kitab yang dipelajari. Kyai membacakan dan menerjemahkan kitab tersebut serta menerangkan maksudnya. Kyai cukup menunjukkan cara yang benar tergantung materi yang diajarkan serta kemampuan santri dalam memahaminya.
- c) Metode hapalan yang juga menempati kedudukan paling penting di pesantren. Pelajaran tertentu dengan materi-materi tertentu diwajibkan untuk dihapal, misalnya al-Quran dan hadis, ada sejumlah ayat-ayat yang wajib dihapal oleh santri begitu juga hadis dan dalam bidang pelajaran lainnya.

³⁰ Mujammil Qomar, *Op.Cit.*, hlm.112.

- d) Metode musyawarah yaitu mendiskusikan pelajaran yang sudah dan akan dipelajari. Metode musyawarah bertujuan memahami materi pelajaran yang diberikan oleh kyai atau ustad.
- e) Metode Muzakarah yaitu merupakan metode yang dijalankan di pesantren dan biasanya dilaksanakan pada malam hari setelah salat isya berjamaah dengan mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah lalu dan sekaligus mendiskusikan pelajaran-pelajaran yang belum dimengerti bersama santri lainnya.³¹

Metode yang paling umum digunakan dalam pembelajaran di pesantren adalah metode ceramah dan metode hapalan. Metode ceramah lebih berfungsi untuk pembelajaran kitab kuning di pesantren maupun di madrasah, guru memberikan penjelasan dengan menerjemahkan kitab tertentu kemudian santri menulis terjemahan di kitab masing-masing. Metode hapalan lebih efektif digunakan untuk menghafalkan al-Quran dan kosakata bahasa Arab.³²

Metode-metode tersebut di atas merupakan metode- metode yang diterapkan di pesantren dan secara bertahap telah mengalami kemajuan yang mana pada saat tumbuhnya pesantren hanya menerapkan metode sorogan dan bandongan. Berkembangnya metode baru tentunya memberikan pengaruh dalam meningkatkan pendidikan di pesantren.

From an education perspective, there are known salafi and khalafi pesantren. Salafi Islamic boarding school is a pesantren that maintains the teaching of classical books (yellow books) as the core of teaching using the sorogan method (bandongan). And khalafi has included general lessons in the developed madrasahs, or opened the type of public schools in pesantren.³³

³¹ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.71.

³² Nur Inayah dan Endry Fatimaningsih, "Sistem Pendidikan Formal di Pondok Pesantren" *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 3:214-263, hlm. 261.

³³ Dr. H. Muntholib, Dr. Maisah, and Dr. Maryani. (2018). "MANAGEMENT OF PESANTREN IN DEVELOPMENT OF ISLAMIC RELIGION EDUCATION IN JAMBI PROVINCE."

Artinya : Dari perspektif pendidikan, dikenal pesantren salafi dan khalafi. Islam Salafi Pondok Pesantren merupakan salah satu pesantren yang mempertahankan pengajaran buku klasikal (kitab kuning) sebagai inti pengajaran dengan metode sorogan (bandongan). Dan khalafi telah memasukkan pelajaran umum di madrasah yang berkembang, atau membuka jenis sekolah umum di pesantren.

4) Manajemen Pondok Pesantren

Pondok pesantren sangat melekat dengan figur kyai. Kyai dalam pesantren merupakan figur sentral, otoritatif, dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan. Hal tersebut erat kaitannya dengan dua faktor yaitu pertama, kepemimpinannya yang tersentralisasi pada individu yang bersandar pada kharisma serta hubungan yang bersifat paternalistik, kebanyakan pesantren

menganut pola mono-manajemen dan mono administrasi

sehingga tidak ada delegasi kewenangan ke unit-unit kerja yang ada dalam organisasi. Kedua kepemilikan pesantren bersifat individual. Otoritas individu kyai sebagai pendiri sekaligus

Pimp.Pondok pesantren sangat berpengaruh besar. Faktor nasab juga kuat sehingga kyai dapat mewariskan kepemimpinan

pesantren kepada anak yang dipercaya tanpa ada komponen pesantren yang mampu menggugat.³⁴

According to Evans :

Pesantren management is the management of education to plan education programs and make decisions in the form of concrete actions carried out comprehensively to cover all pesantren needs, vision, mission and goals of pesantren education. Wherein there are regulations, rules and agreements that should not be contrary to regulations, rules, which are higher than the pesantren rules.³⁵

International Journal of Research - Granthaalayah, 6(9), 407-420.

<https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i9.2018.1253>.

³⁴ Sulthon Masyhud dan Khusnurdilo, Moh. *Manajemen Pondok Pesantren ...* , hlm. 15.

³⁵ Dr. H. Muntholib, Dr. Maisah, and Dr. Maryani. (2018). "MANAGEMENT OF PESANTREN IN DEVELOPMENT OF ISLAMIC RELIGION EDUCATION IN JAMBI PROVINCE."

International Journal of Research - Granthaalayah, 6(9)

Artinya : Menurut Evans :

Manajemen pesantren adalah manajemen pendidikan untuk merencanakan dan membuat program pendidikan. Keputusan berupa tindakan konkrit yang dilakukan secara komprehensif untuk memenuhi semua kebutuhan pesantren, visi, misi dan tujuan pendidikan pesantren. Dimana ada regulasi, aturan dan kesepakatan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan, aturan, yang lebih tinggi dari aturan pesantren.

Seiring dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan kelembagaan pendidikan Islam, otoritas tunggal kyai, baik sebagai pemilik, pemimpin, atau guru utama di pesantren mulai berkurang. Meskipun nilai ketaatan masih tetap menjadi acuan dalam hubungan kyai-santri di lingkungan komunitas santri, namun kyai tidak lagi menjadi tokoh sentral dalam manajemen pendidikan di pesantren. Adanya kebijakan pemerintah yang memberikan dukungan terhadap proses pendidikan di pesantren dan madrasah dan menuntut pertanggungjawaban berdasarkan prosedur penggunaan sumber daya sesuai aturan pemerintah telah ikut mendorong perubahan dalam manajemen di pesantren dari otoritas personal kepada otoritas manajerial dalam bentuk organisasi formal.³⁶ Penyelenggaraan pendidikan formal dalam lingkungan pesantren menyebabkan pesantren mengalami perkembangan pada aspek manajemen, organisasi, dan administrasi pengelolaan keuangan. Dalam beberapa kasus, perkembangan dimulai dari perubahan gaya kepemimpinan pesantren yang awalnya bersifat kharismatik ke rasionalistik, dari otoriter- paternalistik ke diplomatikpartisipatif, sehingga pusat kekuasaan sedikit terdistribusi di kalangan elit pesantren dan tidak terlalu terpusat pada kyai. Pengaruh sistem pendidikan formal

³⁶ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 205.

menuntut kejelasan pola hubungan dan pembagian kerja di antara unit-unit kerja.³⁷

Pada lembaga pesantren lainnya yang berintegrasi dengan pendidikan formal telah membentuk badan pengurus harian yang khusus mengelola dan menangani kegiatan-kegiatan pesantren, misalnya pendidikan formal di madrasah, pengajian, serta sampai pada masalah penginapan (asrama) santri, kehumasan, dan sebagainya. Pada tipe pesantren ini pembagian kerja antar unit sudah berjalan dengan baik, namun tetap saja kyai memiliki pengaruh yang cukup kuat.

5) Tujuan Pendidikan Pesantren

Tujuan pendidikan pesantren tidak terumuskan secara jelas sebab hal ini dimaklumi mengingat pertumbuhan pesantren sejak awal berdirinya tidak membutuhkan legalitas secara formal selain itu dalam menentukan tujuan pesantren diserahkan kepada kyai bersama stafnya. Dengan tidak adanya perumusan secara jelas menyebabkan kesulitan dalam menentukan tujuan kurikulum dan materi pelajaran yang disajikan secara menyeluruh pada tiap-tiap pesantren. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi pesantren yang berbeda-beda.

Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga yang mampu memberi pengaruh yang cukup besar dalam dunia pendidikan, baik jasmani, ruhani maupun intelegensi karena sumber nilai dan norma-norma agama merupakan kerangka acuan dan berpikir serta sikap ideal para santri, sehingga pondok pesantren sering disebut sebagai alat transformasi kultural. Tujuan utama pondok pesantren adalah mencetak ulama dan ahli agama. Kegiatan pembelajaran di pondok pesantren tidak sekedar pemindahan ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, namun yang terpenting adalah penanaman dan

³⁷ Sulthon Masyhud dan Khusnurdilo, Moh. *Manajemen Pondok Pesantren ...* , hlm. 16.

pembentukan nilai-nilai tertentu pada pribadi santri.³⁸ Tujuan utama pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan khususnya dalam pendalaman agama Islam, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lembaga sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam bertujuan menjadikan para santrinya sebagai manusia yang mandiri dan pada satu saat nanti dapat menjadi pemimpin umat menuju keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu menurut Arifin (1993:37) pesantren bertugas untuk mencetak manusia yang benar benar ahli dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan serta berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut pesantren mengajarkan ilmu tauhid, fiqh, tafsir, hadits, nahwu, sharaf, ma'ani, badi' dan bayan, ushul fiqh, musthalah hadits, dan ilmu mantiq. Model pembelajarannya distandarisasikan dengan pengajaran kitab kitab wajib (kutubul muqarrarah) sebagai buku teks yang dikenal dengan sebutan kitab kuning (kitab menjelaskan hukum hukum Islam yang bertuliskan huruf Arab gundul). Sesungguhnya pendidikan pesantren mempunyai tujuan yang juga berdasarkan tujuan pendidikan Nasional yang termaktub dalam Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu bahwa Tujuan Pendidikan Nasional adalah BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB.

³⁸ Uci Sanusi, "Pendidikan Kemandirian di Pondok Pesantren: Studi Mengenai Realitas Kemandirian Santri di Pondok Peantren Bahrul Ulum Tasikmalaya", *Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim*, Vol. 10, No. 2 (2012), hlm. 125.

Tujuan Pendidikan Nasional inilah yang menjadi dasar bagi setiap lembaga pendidikan termasuk pendidikan yang diselenggarakan di pondok pesantren. Secara khusus tujuan pesantren adalah :

1. Mendidik siswa/ santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
2. Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan ajaran islam secara utuh dan dinamis.
3. Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
4. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya).
5. Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-spiritual.
6. Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.³⁹

³⁹ ([http:// keajaiban ikhlas. blogspot. com/ 2013/ 02/ makalah- tentangponok- pesantren. html](http://keajaibanikhlas.blogspot.com/2013/02/makalah-tentangponok-pesantren.html), di download, 12 Juni 2015)

3. Sistem Pendidikan Madrasah

a. Pengertian Madrasah

Madrasah berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat belajar atau sekolah. Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah namun dikhususkan lagi pada sekolah-sekolah agama Islam. Dari penjelasan tersebut penekanan madrasah sebagai suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Di Negara Arab madrasah ditujukan untuk sekolah-sekolah umum, namun di Indonesia ditujukan untuk sekolah-sekolah yang mempelajari ajaran-ajaran Islam. Madrasah pada prinsipnya adalah kelanjutan dari sistem pendidikan pesantren.⁴⁰

Di pesantren dikenal dengan lima elemen penting yaitu kyai, santri, pondok, mesjid, dan kitab-kitab klasik, namun pada sistem madrasah diutamakan tempat belajar, guru, siswa, rencana pembelajaran serta pimpinan. Jika dilihat lagi madrasah mirip dengan sistem sekolah umum di Indonesia, yaitu siswa cukup datang pada jam-jam pelajaran tertentu.⁴¹ Dari segi tingkatannya madrasah terbagi kepada tiga yaitu, madrasah Ibtidaiyah (tingkat dasar), madrasah Tsanawiyah (tingkat menengah), dan madrasah Aliyah (tingkat menengah atas).

b. Sistem Pendidikan dan Pembelajaran di Madrasah

Sistem pendidikan dan pengajaran di madrasah begitu penting sebab berpengaruh pada tercapainya tujuan pendidikan. Sistem pendidikan mencakup seluruh aspek dalam pelaksanaan pendidikan. Salah satunya mengenai kegiatan pembelajaran dan metode penyampaian yang digunakan. Adapun kegiatan pembelajaran merupakan satu usaha yang bersifat sadar tujuan, yang dengan sistematis terarah pada perubahan tingkah laku. Perubahan yang

⁴⁰ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan di Indonesia ...*, hlm.98.

⁴¹ *Ibid*, hlm.101.

dimaksud menunjuk pada suatu proses yang harus dilalui. Proses disini adalah kegiatan pembelajaran sebagai proses interaksi edukatif.

Dalam proses interaksi edukatif pada awalnya peserta didik lebih banyak berperan sebagai objek dan pendidik sebagai sumber ilmu. Namun pada perkembangan selanjutnya seiring berkembangnya metode pembelajaran peserta didik dapat menjalankan fungsinya dalam proses pencarian ilmu dan tak sekedar menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber ilmu.

Mengenai metode pengajaran yang digunakan di madrasah merupakan perpaduan antara sistem pada pondok pesantren dengan sistem yang berlaku di sekolah-sekolah modern. Dalam proses melaksanakan kegiatan pembelajaran metode yang digunakan bervariasi, diantaranya metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, pemberian tugas dan sebagainya.

Unsur pendidikan lainnya yang tak kalah pentingnya yaitu kurikulum. Dalam UU. No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁴² Dalam UU. No. 20 Tahun 2003 madrasah merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran yang sama dengan sekolah-sekolah umum. Kurikulum pada madrasah memuat semua kurikulum yang sama dengan sekolah umum dan ditambah dengan pelajaran agama yang lebih banyak porsi dengan sekolah umum. Oleh karena itu madrasah masih cukup diminati sebab dikenal sebagai sekolah plus disamping memuat pelajaran umum, madrasah juga memuat pelajaran agama yang lebih dari sekolah umum, namun sebenarnya memiliki sisi negatif karena

⁴² Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*.

peserta didik akan terbebani dengan mata pelajaran yang cukup banyak sehingga pencapaian tidak begitu optimal.

c. Manajemen dalam Sistem Pendidikan Madrasah

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran agama Islam dalam jenjang pendidikan rendah dan menengah.

Tumbuhkembangnya madrasah di Indonesia merupakan hasil tarik menarik dengan pendidikan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang berada di satu sisi dengan pendidikan barat yang berada di sisi lain.

Adanya manajemen dalam madrasah atau lebih dikenal dengan MBM (manajemen berbasis madrasah) adalah strategi untuk mewujudkan madrasah yang efektif dan produktif. MBM merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada madrasah dan keterlibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. MBM adalah salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada madrasah untuk mengatur kehidupan sesuai potensi, tuntutan, dan kebutuhannya.

Dengan penerapan MBM, madrasah memiliki *full otority and responsibility* dalam menetapkan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan.

At the MBM system, madrasah is required independently to dig, allocate, prioritize, manage, and be responsible for the empowerment of sources, both to the society and government.

This empowerment of madrasah aims to improve the quality and independence of the madrasah (Mulyasa, 2012, p. 3).⁴³

Artinya : Dalam sistem MBM, madrasah dituntut secara mandiri untuk menggali, mengalokasikan, memprioritaskan, mengelola, dan bertanggung jawab untuk pemberdayaan sumber, baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Pemberdayaan madrasah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian madrasah.

⁴³ Muhajir, *Postgraduate Program of IAIN Sultan Maulana Hasanuddin of Banten*, Jl. Jenderal Sudirman, No. 30, Serang, 42118, Banten, Indonesia. Higher Education Studies; Vol. 6, No. 2; 2016, hlm.51.

Tujuan MBM adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu dapat diperoleh melalui revitalisasi partisipasi orang tua terhadap madrasah dan pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru dan kepala madrasah. Pemerataan pendidikan diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Selain tujuan di atas, MBM juga bertujuan mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan adanya kesempatan yang diberikan kepada kepala madrasah, maka baik guru maupun kepala madrasah didorong untuk mengembangkan kurikulum serta berinovasi dengan melakukan eksperimen di lingkungan madrasah.⁴⁴

Dengan masuknya MBM dalam madrasah atau era otonomi pendidikan maka ada beberapa hal yang harus dilakukan madrasah. Pertama, mengakomodasi berbagai masukan dan kritik dari stakeholders, sekaligus memberikan kepercayaan kepada mereka untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah. Kedua, madrasah hendaknya menjadi lembaga inklusif dan universal yang mampu keluar dari jebakan-jebakan dikotomis yang selama ini melingkupi keilmuan di lembaga pendidikan ini. Madrasah hendaknya menerima integrasi ilmu-ilmu umum dengan terbuka, serta memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk mendalami pengetahuan/keilmuan sesuai pilihan atau minatnya. Ketiga, madrasah harus menjadi lembaga responsive terhadap berbagai perubahan dan kebutuhan masyarakatnya khususnya yang terjadi dalam dunia kerja, artinya bagaimana madrasah mampu menyediakan lulusan yang siap

⁴⁴ Ahmad Qorib, "Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah At Tanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro)", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 14, No. 1 (2005), hlm. 46.

kerja dengan berbekal nilai-nilai keagamaan. Hal ini tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak sedikit.⁴⁵

Otonomi pendidikan memberikan kesempatan luas terhadap lembaga pendidikan madrasah menuju kemandirian dan keberdayaannya dalam bingkai keislaman dan kemasyarakatan dan hal ini membutuhkan tanggung jawab dari diri sendiri dan masyarakat.

e. Kebijakan dan Sistem Madrasah di Indonesia.

Eksistensi madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tergolong fenomena modern yaitu dimulai sekitar awal abad 20. Buku-buku sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejauh ini agaknya tidak pernah menginformasikan adanya lembaga pendidikan yang disebut madrasah pada masa awal-awal penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Madrasah di Indonesia bisa dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau.

Sebagian sarjana berasumsi bahwa tradisi pendidikan Islam di Indonesia tidak sepenuhnya khas Indonesia, kecuali hanya menambahkan muatan dan corak ke-Islaman terhadap tradisi pendidikan yang sudah ada, terutama yang bermula dari agama Hindu. IP Simanjuntak berargumentasi misalnya bahwa, “masuknya ajaran Islam tidak merubah hakekat agama yang formil, yang berubah sejak pengembangan agama Islam adalah: isi agama yang dipelajari, bahasa yang menjadi wahana bagi agama yang dipelajari itu, serta latar belakang pelajar-pelajar”. Ditambahkannya lagi, “dalam zaman pengembangannya, agama Islam tidak mengalami perubahan. Yang dimaksudkan dengan kalimat itu, ialah yang berkenaan dengan struktur organisasi pendidikan keagamaan itu. Mengikuti asumsi ini orang tentu akan mudah cenderung beranggapan bahwa pertumbuhan madrasah di Indonesia sepenuhnya merupakan usaha penyesuaian atas

⁴⁵ Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta: Listafariska Putra, 2004), hlm. 115.

tradisi pengembangan pemerintah Hindia Belanda. Mengingat struktur dan mekanismenya yang hampir sama, sekilas dapat diduga bahwa madrasah merupakan bentuk lain dari sekolah yang hanya diberi muatan dan corak ke-Islaman⁴⁶.

Asumsi seperti itu agaknya tidak sepenuhnya benar, meskipun dalam ukuran tertentu tidak bisa diabaikan bahwa pertumbuhan madrasah itu merupakan respon pendidikan Islam terhadap sistem persekolahan yang sudah menjadi kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda dalam rangka politik etisnya. Latar belakang lain yang layak dipertimbangkan adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan madrasah pada awal abad 21 ini merupakan bagian dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, yang memiliki corak cukup intensif dengan gerakan pembaharuan di Timur Tengah. Sebagai agama yang universal, Islam membawa peradabannya sendiri termasuk dalam bidang pendidikan yang berakar pada tradisi yang sangat panjang. Sejak masa Rasulullah ketika bersentuhan dengan situasi yang partikular, peradaban Islam itu tetap mempertahankan esensinya, walaupun mungkin secara instrumental menampilkan bentuk-bentuk yang kondisional. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan madrasah di Indonesia, aspek universal dari tradisi itu tidak bisa dilepaskan karena memang dalam kenyataannya eksistensi lembaga madrasah Islam sudah berkembang sejak masa Islam klasik, dan bahkan terus berkembang hingga masa modern dengan segala bentuk penyesuaian dan pembaharuannya. Senada dengan hal di atas Muhaimin menegaskan bahwa latar belakang lahirnya madrasah di Indonesia adalah:

1. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam.

⁴⁶Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, Cet.2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 81

2. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan memperoleh ijazah.
3. Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam khususnya santri yang terpujau dengan barat sebagai sistem pendidikan mereka.
4. Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan

modern dari hasil akulturasi.⁴⁷

Dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia, kemunculan dan perkembangan madrasah tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama Islam dan kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam, baik di Jawa, Sumatera maupun di Kalimantan. Bagi kalangan pembaharu, pendidikan agaknya senantiasa dipandang sebagai aspek strategis dalam membentuk pandangan ke-Islaman masyarakat. Dalam kenyataan, pendidikan yang terlalu berorientasi pada ilmu-ilmu ubudiyah. Sebagaimana ditunjukkan dalam pendidikan di mesjid, surau dan pesantren, pandangan ke-Islaman masyarakat agaknya kurang diperhatikan kepada masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya. Karena itu, untuk melakukan pembaharuan terhadap pandangan dan tindakan masyarakat itu, langkah strategis yang harus ditempuh adalah memperbaharui sistem pendidikannya. Dalam konteks inilah agaknya pada awal abad 20 madrasah muncul dan berkembang di Indonesia. Tercatat Madrasah Adabiyah di Padang (Sumatra Barat), yang didirikan oleh Syekh Abdullah Akhmad pada tahun 1909 sebagai madrasah pertama di Indonesia. Pada mulanya lembaga pendidikan agama ini bercorak agama semata-mata. Namun kemudian pada tahun 1915 berubah corak menjadi HIS (Holland

⁴⁷ Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Trigenda, 1993), h. 305

Inland School) Adabiyah. HIS Adabiyah merupakan sekolah yang memasukkan pelajaran umum ke dalam sistem pendidikannya di samping pelajaran utamanya pelajaran agama.⁴⁸ Pada tahun berikutnya yaitu pada tanggal 10 Oktober 1915 Zainuddin Labai el Yunusyî mendirikan madrasah diniyah. Madrasah Diniyah Zainuddin Labai dilakukan secara perkelas dengan susunan pelajaran yang terpadu antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Setelah itu Madrasah Diniyah hampir berkembang di seluruh Indonesia, baik merupakan bagian dari pesantren maupun surau, atau berdiri di luarnya. Pada tahun 1916 di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (Jawa Timur), telah didirikan Madrasah Salafiyah oleh KH. Hasyim Asy'ari, sebagai persiapan untuk melanjutkan pelajaran ke pesantren. Pada tahun 1929 atas usaha Kyai Ilyas, diadakan pembaharuan dengan memasukan pengetahuan umum pada madrasah tersebut. Kemudian pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri Madrasah Muhammadiyah (Kweekhschool Muhammadiyah) yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah sebagai realisasi dari cita-cita pembaharuan pendidikan Islam yang diperoleh oleh

K. H. Ahmad Dahlan.⁴⁹ Dari sekian madrasah yang lahir di abad 20 di hampir seluruh wilayah Indonesia pada awalnya masih bersifat diniyah semata-mata. Baru sekitar tahun 1930, sedikit demi sedikit, akan tetapi bertambah cepat, dilakukan pembaharuan terhadap madrasah dalam rangka memantapkan keberadaannya, khususnya dengan penambahan pengetahuan umum.⁵⁰ Hal ini dapat dilihat dari struktur mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pada rencana pelajaran Madrasah Tsanawiyah tahun 1931 maka struktur

⁴⁸ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), h. 63

⁴⁹ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah, Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.169

⁵⁰ B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), h. 121

jumlah jam mata pelajaran terdiri pelajaran agama 18 jam/minggu (62,07 %) dan mata pelajaran umum 11 jam/minggu (37,03%). Mata pelajaran agama terdiri Tafsir, Hadist/Mustalah, Tauhid, Fikh/Hikmah Tasyri, Ushul Fiqh, Sejarah Islam dan Bahasa Arab. Sedangkan mata pelajaran Umum terdiri: Ilmu Bumi/ Falak, Ilmu alam, Ilmu Tumbuh-tumbuhan, Ilmu Hewan, Ilmu Tubuh Manusia, Ilmu Berhitung, Bahasa Inggris dan Gerak Badan.⁵¹ Rencana pelajaran Madrasah Ibtidaiyah tahun 1936 terdiri 15 jam mata pelajaran agama (44,12 %) dan 19 jam mata pelajaran umum (55,15 %). Mata pelajaran agama terdiri Qur'an, Tauhid, Fiqh/Ushul Fiqh, Tafsir, Hadis dan Bahasa Arab. Adapun mata pelajaran umum terdiri Bahasa Indonesia, Berhitung, Ilmu Bumi, Sejarah, Ilmu Alam, Menulis Arab Latin, Menggambar, Pergerakan Badan dan Pekerjaan Tangan.⁵² Pada mulanya perkembangan madrasah merupakan perkembangan pendidikan yang mandiri, tanpa bimbingan dan bantuan pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam termasuk terhadap madrasah bersifat menekan, karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Salah satu kebijakan Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam adalah penerbitan Ordonansi Guru. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Tidak tiap orang, meskipun ahli ilmu agama, dapat mengajar di lembaga lembaga pendidikan. Latar belakang Ordonansi guru ini sepenuhnya bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak memicu perlawanan rakyat terhadap penjajah.⁵³ Pada masa pemerintahan penjajahan Jepang, madrasah mendapat bantuan dana. Hal ini

⁵¹Hasbullah, op.cit., h.173

⁵²Hasbullah, op.cit., h.172

⁵³Maksum, op.cit., h.114-115

dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dari ummat Islam. Bahkan Jepang membiarkan kembali dibukanya madrasah-madrasah yang pernah ditutup pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengamankan kepentingan Jepang, maka pemerintahan penjajah Jepang lebih banyak mengangkat kalangan priyayi dalam jabatan di Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama bertugas antara lain mengkoordinasikan pertemuan dan pembinaan guru-guru agama. Meskipun dengan alasan pembinaan kecakapan, tetapi usaha ini pada dasarnya bertujuan agar pelaksanaan pendidikan Islam baik di madrasah ataupun di pesantren tetap dalam kontrol pemerintah. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan madrasah lebih baik. Pemerintahan Republik Indonesia memberikan perhatian kepada madrasah sebagai modal sumber pendidikan nasional yang berdasarkan UUD 1945⁵⁴. BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan pada masa itu merumuskan pokok-pokok usaha pendidikan yang menetapkan bahwa: madrasah dan pesantren yang pada hakekatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintahan Menteri PP dan K, yang saat itu dijabat oleh Mr. R. Suwandi, mengeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasikan serta diberi bantuan biaya dan lain-lain.⁵⁵ Ketika Departemen Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946 maka tugas Bagian Pendidikan adalah mengadakan suatu “pilot project” sekolah yang akan menjadi contoh bagi orang-orang atau organisasi yang ingin mendirikan sekolah secara

⁵⁴ Hanun Asrorah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h.194

⁵⁵ Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: t.p, 1984), h. 19

pertikelir (swasta). Tugas ini mengandung maksud sekolah agama (madrasah) milik pemerintah diperlukan sebagai panutan atau contoh bagi pihak swasta dalam mengelola pendidikan agama. Pendirian madrasah negeri merupakan sisi lain dari bentuk bantuan dan pembinaan terhadap madrasah swasta.⁵⁶ Dalam rangka pengaturan kegiatan pendidikan di madrasah maka pemerintah dalam hal ini Departemen Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1946, tanggal 19 Desember 1946 yang menetapkan bahwa madrasah adalah tiap-tiap tempat yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama sebagai pokok pengajarannya dan beberapa mata pelajaran umum yang juga wajib diajarkan oleh madrasah. Adapun mata pelajaran yang dimaksud adalah: Bahasa Indonesia, berhitung, dan membaca serta menulis dengan huruf-huruf lain di madrasah tingkat rendah ditambah dengan Ilmu Bumi, Sejarah, Kesehatan, TumbuhTumbuhan dan Ilmu Alam di madrasah lanjutan. Dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang jenjang pendidikan di madrasah yang terdiri:

1. Madrasah tingkat rendah, dengan lama belajar sekurangkurangnya 4 tahun dan berumur 6 sampai 15 tahun.
2. Madrasah lanjutan dengan masa belajar sekurangkurangnya 3 tahun setelah tamat madrasah tingkat rendah dan berumur 11 tahun ke atas.

Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 1952 yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa jenjang pendidikan madrasah adalah:

1. Madrasah Rendah (sekarang dikenal dengan sebutan Madrasah Ibtidaiyah), dengan masa belajar 6 tahun.

⁵⁶Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 53

2. Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (sekarang Tsanawiyah), lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Tsanawiyah.
3. Madrasah Lanjutan Atas (sekarang Madrasah Aliyah), lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Tsanawiyah.⁵⁷

Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagian besar berasal dari madrasah-madrasah yang semula diasuh oleh Pemerintahan Daerah Aceh, Lampung dan Surakarta. Sedangkan sebelumnya adalah madrasah tsanawiyah swasta. Adapun madrasah aliyah negeri pertama kali didirikan pada tahun 1967 melalui proses penegerian dari madrasah aliyah swasta yaitu Madrasah Aliyah Swasta Surakarta, Madrasah Aliyah di Magetan Jawa Timur, dan Madrasah Aliyah Palangki di Sumatera Barat.

Keberadaan madrasah lebih diperkokoh lagi karena dicantumkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 tahun 1950, pada pasal 10 ayat 2 dinyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Untuk itu, pemerintah menggariskan kebijaksanaan yang diakui dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajar, harus terdaftar pada Kementerian Agama, dengan syarat madrasah yang bersangkutan harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu, secara teratur disamping mata pelajaran umum.

Seiring dengan itu Departemen Agama RI pada tahun 1957/1958 melakukan pembaharuan di Madrasah adalah dengan melaksanakan Madrasah Wajib Belajar (MWB) Dilaksanakannya MWB tersebut dimaksudkan sebagai usaha awal untuk memberi bantuan dan pembinaan madrasah dalam rangka penyeragaman

⁵⁷ Husni Rahim, *op.cit.*, h. 54

materi kurikulum dan system penyelenggaraannya, dalam rangka meningkatkan mutu madrasah ibtidaiyah.⁵⁸

Adapun tujuan program Madrasah Wajib Belajar adalah:

1. Turut berusaha dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Wajib Belajar di Indonesia. Dalam hubungan ini Madrasah Wajib Belajar akan diperlakukan mempunyai hak dan kewajiban sebagai sekolah negeri atau sekolah partikelir yang melaksanakan wajib belajar.
2. Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa untuk mencapai kemajuan dilapangan ekonomi,

industrialisasi dan transmigrasi.⁵⁹

Pengorganisasian dan struktur kurikulum serta penyelenggaraan MWB di atur sebagai berikut:

1. MWB adalah tanggung jawab pemerintah baik mengenai guru-guru, alat-alat, maupun buku-buku pelajarannya apabila madrasah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menjadi MWB.
2. MWB menampung murid-murid yang berumur antara 6 – 14 tahun. Tujuan MWB adalah untuk mempersiapkan mutu murid untuk dapat hidup mandiri dan mencari nafkah, terutama dalam lapangan ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi.
3. Lama belajar MWB 8 tahun.
4. Pelajaran yang diberikan di MWB terdiri dari tiga kelompok studi, yaitu pelajaran agama, pengetahuan umum dan pelajaran keterampilan dan kerajinan tangan.
5. 25 % dari jumlah jam pelajaran digunakan untuk pelajaran agama, sedangkan 75 % untuk pelajaran umum dan keterampilan atau kerajinan tangan.⁶⁰

⁵⁸ Hasbullah, op.cit., h. 180

⁵⁹ I. Djumhur D, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: CV. Ilmu, 1979), h. 266

⁶⁰ Zuhairini, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN*, (Jakarta: t.p, 1983), h.79

Walaupun demikian keberadaan madrasah belum diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini disebabkan karena kenyataan bahwa sistem pendidikan di madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah.

Madrasah baru berhasil mendapatkan status disamakan dengan sekolah umum yang setingkat diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 Maret 1979 yang menegaskan bahwa kedudukan madrasah sama dan sejajar dengan sekolah formal lainnya. Dengan demikian siswa lulusan sekolah madrasah dapat memasuki jenjang sekolah umum lain yang lebih tinggi, atau bisa pindah ke sekolah formal dan begitu juga sebaliknya. Di samping itu SKB tersebut menetapkan bahwa mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar, yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum.

Penyelenggaraan madrasah dengan pola SKB 3 menteri menurut Marwan Saridjo membawa akibat:

1. Gengsi madrasah menjadi naik. Dengan SKB itu ijazah madrasah bukan saja diakui oleh Departemen Agama tetapi juga oleh instansi lain. Dan yang lebih penting adalah tamatan madrasah dapat melakukan mobilisasi kelembaga pendidikan umum yang lebih tinggi disamping diterima pada lingkungan pendidikan yang ada dilingkungan Departemen Agama.
2. Setelah SKB itu perkembangan madrasah cukup menggembirakan, sekalipun dari segi mutu belum memuaskan atau kadang-kadang memprihatinkan (antara lain karena kekurangan tenaga guru).

3. Kecenderungan kuat dirasakan setelah SKB tersebut ialah adanya keinginan anak-anak untuk mobilitas ke sekolah umum. Hal ini dapat dilihat dari peserta anak-anak madrasah yang mengikuti EBTANAS yang diselenggarakan oleh Depdikbud, disamping mereka mengikuti Ebtan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.
4. Melihat kecenderungan ini maka tidak mengherankan kalau dikesankan bahwa madrasah sudah seperti “sekolah umum” yang berarti identitas madrasah semakin berkurang bahkan

hilang.⁶¹

SKB tiga menteri tidak diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat masih banyak madrasah yang bertahan dengan sistem lamanya, terutama madrasah yang berbasis di Pondok Pesantren. Mereka dikenal dengan nama Madrasah Diniyah Awaliyah (tingkat dasar), Madrasah Diniyah Wustho (tingkat menengah pertama) dan Madrasah Diniyah Aliyah (tingkat menengah atas). Madrasah diniyah dari semua tingkatan tersebut semuanya mempelajari mata pelajaran agama.⁶²

Perubahan struktur mata pelajaran dari semuanya atau sebagian besar mempelajari mata pelajaran agama kepada struktur menurut SKB (70% umum dan 30% Agama) maka berakibat penguasaan lulusan terhadap ilmu agama semakin berkurang sehingga dikhawatirkan membawa dampak bagi usaha mencetak kader-kader ulama. Oleh karena itu Menteri Agama yang pada waktu itu dijabat oleh H. Munawir Syadzali mencetuskan penyelenggaraan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) pada tahun 1987 dengan struktur kurikulum 75% atau 80% Agama dan 20 atau 25 % mata pelajaran umum.⁶³ Untuk itu dipilih 5 Madrasah

⁶¹ Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), h.120

⁶² Hasbullah, *op.cit.*, .h.183-184

⁶³ Marwan Saridjo, *op.cit.*, h.125

Aliyah sebagai pilot proyek yang merupakan studi kelayakan program dimaksud. Adapun kelima Madrasah Aliyah yang ditunjuk untuk studi kelayakan adalah: MAN Darussalam Ciamis, MAN Ujung Pandang, MAN 1 Yogyakarta, MAN Kotobaru Padang Panjang Sumatera Barat dan MAN Jember. Setelah berjalan beberapa tahun, maka pada tahun 1993 MAPK diganti menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan.

Puncak pengakuan madrasah oleh pemerintahan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989 dimana madrasah diakui secara penuh menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal tersebut jelas terlihat pada undang-undang tersebut terdapat aturan tentang madrasah secara defenitif dimana madrasah dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional.⁶⁴ Berdasarkan pasal 4 ayat 3 PP nomor 28 tahun 1990 disebutkan bahwa MI dan MTs dinyatakan sebagai Pendidikan Dasar yaitu SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam. Sedangkan Madrasah Aliyah disebut sebagai SMU yang berciri khas agama Islam.⁶⁵

Sebagai konsekuensi dari statusnya yang disamakan sekolah umum yang diasuh oleh Kementerian Pendidikan Nasional, maka kurikulum yang dipakai pada madrasah menggunakan kurikulum keluaran Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian ditambah dengan kurikulum agama yang disusun oleh Departemen Agama. Untuk itu maka Kementerian Agama mengembangkan kurikulum MI, MTs dan MA yang mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. Pada tahun 1993 Menteri Agama menetapkan

⁶⁴ Maksum, op.cit., h. 132-133

⁶⁵ Hasbullah, op.cit., h.189

dengan Surat Keputusan nomor 371 yang mengatur Kurikulum MI, SK nomor 372 untuk Kurikulum MTs dan SK nomor 373 untuk kurikulum MA. Adapun struktur mata pelajaran MI terdiri 12-16 % mata pelajaran agama dan 84-88% mata pelajaran umum. Sedangkan untuk MTs terdiri dari 20% mata pelajaran agama dan 80% mata pelajaran umum. Sementara MA terdiri dari 11-13 % mata pelajaran agama dan 87-89 % mata pelajaran umum.⁶⁶

Eksistensi madrasah benar-benar mendapat pengakuan yang eksplisit dari pemerintah RI setelah madrasah disebut dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 ayat 3.⁶⁷ Dengan demikian bila dibandingkan dengan UUSPN tahun 1989, maka UUSPN tahun 2003 lebih maju, walaupun kedua UndangUndang tersebut masih memelihara sistem pendidikan dualistik dalam sistem pendidikan di Indonesia.⁶⁸

Dengan UUSPN tahun 2003, maka madrasah memiliki peluang untuk memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan agar porsi pendidikan agama lebih besar. Karena berdasarkan pasal 36 ayat 2 disebutkan bahwa: Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Atas dasar tuntutan UU tersebut maka pemerintah mengganti kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) menjadi kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar

⁶⁶ Hasbullah, op.cit., h..191-196

⁶⁷ Pasal 17 ayat 2 berbunyi: Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18 ayat 3 berbunyi: Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

⁶⁸ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke 20, Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, (Jakarta: Fajar Interpratama Ofset, 2012), h. 269

kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang otonomi luas diberikan pada setiap satuan pendidikan. Dalam KTSP, maka sekolah dapat memasukkan tambahan mata pelajaran keagamaan untuk dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal.

Beberapa ketentuan muatan lokal sebagai berikut:

1. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk mengem-bangkan kompetensi sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah.
2. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
3. Substansi yang akan dikembangkan, materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mapel lain, atau terlalu substansinya sehingga harus dikembangkan menjadi Mapel tersendiri;
4. Merupakan mata pelajaran wajib yang tercantum dalam Struktur kurikulum; 30 Disamping itu madrasah juga masih dapat menambah jam belajar mata pelajaran agama yang ada selama 4

jam pelajaran perminggu.⁶⁹

Dengan demikian porsi waktu untuk mata pelajaran agama bertambah banyak, sehingga harapan untuk menciptakan lulusan yang memiliki pengetahuan agama yang mamadai dapat tercapai.

3. Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah

Pesantren dengan segala keunikan yang dimilikinya masih diharapkan menjadi penopang berkembangnya sistem pendidikan di Indonesia. Keaslian dan kekhasan pesantren disamping sebagai khazanah tradisi budaya bangsa juga merupakan kekuatan penyangga pilar pendidikan untuk memunculkan pemimpin bangsa yang bermoral. Oleh karena itu, arus globalisasi mengandalkan tuntutan profesionalisme dalam mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu. Realitas

69 <http://www.slideshare.net/NASuprawoto/penyusunan-ktsp3012909>

inilah yang menuntut adanya manajemen pengelolaan lembaga pendidikan sesuai tuntutan zaman. Signifikansi profesionalitas manajemen pendidikan menjadi sebuah keniscayaan di tengah dahsyatnya arus industrialisasi dan perkembangan teknologi modern.⁷⁰

Tuntutan profesionalitas manajerial madrasah yang banhyak dikelola secara integral dengan pesantren. Di Indonesia pesantren baik modern maupun salaf dominan memiliki lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada di pesantren tersebut berbentuk madrasah maupun sekolah umum.

Madrasah merupakan wujud pembaruan pendidikan pesantren yang muncul pada abad ke 20 dan yang melatarbelakangi munculnya adalah adanya gerakan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia dan adanya respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda.⁷¹ Berbeda dengan kemunculan madrasah di Timur Tengah yang tekesan lebih modern sejak awal pertumbuhannya.

Pendirian madrasah di pesantren menemukan momentumnya ketika K.H. A. Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama RI. Selaku Menteri Agama, beliau melakukan pembaruan pendidikan Agama Islam melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1950 yang menginstruksikan pemberian pelajaran umum di madrasah dan pemberian pelajaran agama di sekolah umum negri/swasta. Hal ini semakin mendorong pesantren mengadopsi madrasah ke dalam pesantren.⁷²

Kemunculan dan perkembangan madrasah juga tidak terlepas dari ide pembaruan Islam dan selanjutnya dikembangkan oleh organisasi Islam di Indonesia. Pendidikan pesantren pada dasarnya dianggap

⁷⁰ *Ibid*, hlm.118.

⁷¹ Maksun, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 82.

⁷² Muh. Idris Usman, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangan Masa Kini)," *Jurnal Al Hikmah Vol. XIV Nomor 1/2013*, hlm.

sebagai aspek strategis dalam bentuk pandangan keislaman masyarakat. Namun pada kenyataannya saat ini kecendrungan masyarakat telah berubah, permasalahannya bukan pada potensi santri lulusan pesantren melainkan pergeseran ukuran. Ukuran dalam masyarakat adalah menyangkut wawasan sosial, organisasi modern, pluralisme keilmuan dan sebagainya. Masalah ini sama sekali tidak diperhitungkan pada masa lampau dalam materi pendidikan pesantren. Saat ini pesantren menghadapi tantangan baru yaitu tantangan pembangunan, kemajuan, pembaruan, serta tantangan keterbukaan dan globalisasi.⁷³

Oleh karenanya sistem pendidikan pesantren harus melakukan upaya rekonstruksi pemahaman terhadap ajaran-ajarannya agar tetap relevan dan bertahan. Lebih lanjut pesantren harus mampu memadukan akar tradisi dan modernitas. Di samping itu, pesantren dituntut bersifat kreatif dalam mengelola diri. Dalam merespon tuntutan tersebut pesantren dapat melakukan improvisasi dan inovasi tanpa mengubah watak dan karakteristik tradisional pesantren.

Gagasan dan upaya untuk mewujudkan kebijakan pendidikan nasional yang terintegrasi dengan meniadakan dualisme sistem pendidikan yang telah muncul sejak awal kemerdekaan ketika pemerintah menyiapkan rancangan kebijakan pendidikan nasional dalam bentuk undang-undang sistem pendidikan.⁷⁴

Dalam perkembangan madrasah dalam pesantren semakin bertambah. Kehadiran madrasah tidak bermaksud menggusur pendidikan tradisional pesantren namun justru akan melengkapinya. Bahkan setelah masa kemerdekaan banyak pesantren yang menyesuaikan dengan tuntutan keadaan dengan menyelenggarakan pendidikan formal

⁷³ Mujammil Qomar, *Pesantren: dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi ...*, hlm. 73.

⁷⁴ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, hlm.

disamping tetap meneruskan sistem pendidikan khas pesantren yaitu wetonan dan sorogan.⁷⁵

Berbeda dengan pesantren, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang lebih modern dari sudut metodologi, kurikulum pengajarannya dan manajemennya. Keberadaan madrasah dalam pesantren diharapkan mampu menunjukkan gambaran baru tentang bentuk lembaga pendidikan yang lebih modern dan selanjutnya dapat memajukan lembaga pendidikan pesantren.⁷⁶

Perubahan yang terjadi pada bentuk kelembagaan dan sistem pendidikan Islam, selain merupakan implikasi dari perkembangan kebijakan negara dan politik pendidikan nasional, yang menempatkan madrasah sebagai sekolah umum bercirikan Islam dan pada UU Sisdiknas memberikan kedudukan yang sama dengan sekolah umum. Hal ini juga merupakan jawaban terhadap perubahan tuntutan dan kebutuhan masyarakat muslim dalam menghadapi perkembangan dunia modern.⁷⁷

Pengintegrasian sistem pendidikan pesantren dan madrasah merupakan pembaruan dalam menjaga eksistensi pondok pesantren dalam menghadapi arus globalisasi, hal ini dimengerti mengingat kebutuhan masyarakat terhadap materi bersifat praktis namun tradisi asli pesantren tetap dipertahankan demi menjaga karakteristik pesantren.

B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang kiranya relevan dan dapat menjadi acuan referensi antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Sulaiman, dengan judul “Integrasi Kurikulum Madrasah Ke Dalam Kurikulum Pesantren Di Pondok Pesantren Modern Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Integrasi yang dilakukan PPM

⁷⁵ Mujammil Qomar, *Op.Cit.*, hlm. 95.

⁷⁶ *Ibid*, hlm.96.

⁷⁷ Nurhayati Djamas, *Op.Cit.*, hlm. 200.

Darunnajat adalah dengan memasukan lembaga pendidikan MTs dan MA ke dalam program pendidikannya yang disebut KMI. Keadaan ini meniscayakan adanya perubahan kurikulum. Kurikulum pelajaran-pelajaran agama, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris dari pesantren dipertahankan sedangkan kurikulum pesantren yang berupa pelajaran umum diganti dengan kurikulum pelajaran umum dari pemerintah. Sementara itu pelajaran-pelajaran rumpun PAI tidak dimasukan ke dalam kurikulum KMI. Integrasi kurikulum di PPM Darunnajat menggunakan model *connected* yaitu dengan menghubungkan antara materi pesantren (baca: agama) dengan materi pelajaran umum seperti IPA dan IPS dan materipelajaran umum dengan pesantren.⁷⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Zaenul Fitri dengan judul “Integrasi Pendidikan di Pondok Pesantren (Tinjauan Manajemen dalam Kompleksitas Persaingan Global)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa beberapa model pesantren yang memadukan antara kemampuan ilmu agama dan kecakapan hidup (*lifeskill*) dianggap mampu bersaing di era global. Terlebih adanya Masyarat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Di mana sumberdaya manusia bebas berkompetisi untuk memperebutkan peluang kerja yang sama, sehingga bari mereka yang memiliki keahlian khususlah yang akan dapat memanfaatkan peluang tersebut. Maka manajemen pesantren yang terintegrasi adalah jawaban atas kompleksitas dan tuntutan dari globalisasi dunia saat ini.⁷⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohdor Ali dengan judul “Studi Integrasi kurikulum madrasah dan kurikulum pesantren Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Tanwirul Islam Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pada dasarnya, kurikulum yang diterapkan yaitu dengan menggabungkan

⁷⁸ Akhmad Sulaiman, “Integrasi Kurikulum Madrasah Ke Dalam Kurikulum Pesantren Di Pondok Pesantren Modern Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes”. Tesis Pascasarjana IAIN Purwokerto 2017

⁷⁹ Agus Zaenul Fitri. *Integrasi Pendidikan di Pondok Pesantren (Tinjauan Manajemen dalam Kompleksitas Persaingan Global)*. Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2017.

dua kurikulum yakni kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Bentuk integrasi kurikulum tersebut yang menonjol ditemukan pada: (a) Pada mata pelajaran yang disampaikan dimana di antara dua kurikulum tersebut saling mendukung dan menguatkan; dan (b) Pada metode pembelajarannya, yakni menggabungkan tiga model atau metode yaitu ceramah, demonstrasi, dan dialog. Kedua, hasil penerapan integrasi kurikulum madrasah dan kurikulum pesantren yang diterapkan cukup baik dan menunjang terhadap realisasi tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan pondok pesantren serta memberikan pengetahuan plus bagi santrinya.⁸⁰

Dengan demikian, penulis mencermati bahwa terdapat kesamaan tema penelitian, yaitu membahas mengenai integrasi pendidikan pesantren dan madrasah. Namun demikian, penelitian tentang Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Madrasah di Pondok Pesantren Darul Aitam Nurul Iman Kesugihan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal tersebut karena penulis lebih menyoroti pada upaya yang dilakukan, bentuk-bentuk integrasi, dan hasil dari integrasi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren tersebut.

Tabel : 1

No.	Peneliti, Judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas penelitian
1.	Akhmad Sulaiman, <i>"Integrasi Kurikulum Madrasah Ke Dalam Kurikulum Pesantren Di Pondok Pesantren"</i>	Membahas pendidikan dalam pondok pesantren.	Terfokus Dengan pengembangan Kurikulum Dalam pesantren	Penelitian ini mengkaji : Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren Dan Pendidikan Madrasah Di Pondok Pesantren

⁸⁰ Mohdor Ali. *Studi Integrasi kurikulum madrasah dan kurikulum pesantren Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Tanwirul Islam Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang*. Tesis. UIN Sunan Ampel, 2012.

	<p><i>Modern Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes</i>". Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2017</p>			<p>Daarul Aitam Nurul Iman, Kuripan Kidul, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap.</p>
2.	<p>Agus Zaenul Fitri, "<i>Integrasi Pendidikan di Pondok Pesantren (Tinjauan Manajemen dalam Kompleksitas Persaingan Global)</i>". Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2017.</p>	<p>Memadukan antara kemampuan ilmu agama dan kecakapan hidup (<i>lifeskill</i>)</p>	<p>Lebih menyiapkan kecakapan hidup (<i>lifeskill</i>) yang mampu mampu bersaing di era global.</p>	
3.	<p>Mohdor Ali, "<i>Studi Integrasi kurikulum madrasah dan kurikulum pesantren Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Tanwirul Islam Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang</i>". Tesis. UIN Sunan Ampel, 2012.</p>	<p>menggabungkan dua kurikulum yakni kurikulum nasional dan kurikulum lokal</p>	<p>Terfokus penggabungan beberapa metode yaitu ceramah, demonstrasi, dan dialog.</p>	

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis atau Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosial keagamaan tentang pengembangan pendidikan keagamaan dengan menggunakan *pendekatan kualitatif*, dengan mendasarkan data pada kajian literatur, dokumen rekaman produk kebijakan dan data lapangan. Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu cara pandang terhadap asumsi-asumsi dasar dari suatu penelitian.⁸¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah yang penekanannya pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.⁸²

Melalui pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berusaha menyingkap bagaimana integrasi pendidikan pesantren dan pendidikan madrasah di Pondok Pesantren Darul Aitam Nurul Iman Kuripan Kidul, Kesugihan, Cilacap. Hal tersebut sebagai antisipasi *ouput* pesantren di era regulasi pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang berupaya memahami sesuatu dari sudut pandang keutuhannya, sesuai untuk dipergunakan dalam penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Darul Aitam Nurul Iman Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Sedangkan waktu penelitian yang dilaksanakan yaitu selama \pm 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2021.

⁸¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pustaka Setia: Bandung, 2011), hal. 82.

⁸² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.5.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan. Dengan kata lain, subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Dalam penelitian sosial, subjek penelitian adalah manusia. Kita tidak perlu mengatakan manusia yang hidup karena pembaca mesti sudah tahu kalau orang mati tidak bisa diajak berinteraksi meskipun bisa diidentifikasi dan diinvestigasi dalam rangka mengumpulkan data. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut juga sebagai informan, artinya orang-orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Interaksi bisa berbentuk wawancara, diskusi dalam fokus grup, survey, dan sebagainya yang bisa dilakukan secara langsung atau dengan mediasi teknologi. Identifikasi informasi bisa berupa opini dalam bentuk tulisan, audio, gambar, atau video yang pernah dikemukakan oleh subjek.

Sebagai subjek penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan sebagai informannya adalah Ketua Pondok Pesantren, Kepala Madrasah, Pimpinan Pondok, Guru, Ustadz, dan Santri di Pondok Pesantren Darul Aitam Nurul Iman Kesugihan. Selanjutnya, objek penelitian ini adalah Integrasi Pendidikan Formal dan Pendidikan Pesantren di Pondok Pesantren Darul Aitam Nurul Iman Kesugihan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang

tepat. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan penulis yaitu tentang penerapan manajemen mutu di madrasah secara mendalam serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola mutu madrasah dalam mewujudkan madrasah unggulan.

Penelitian ini kategori penelitian lapangan. Jika dilihat dari tujuan dan kegunaan penelitian, data dan informasi yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dilapangan, sedangkan data sekunder di peroleh dari literatur yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁸³ Maksud wawancara adalah mengkonstruksikan tentang orang kejadian kegiatan, perasaan, motifasi, tuntutan, kepedulian dan kebulatan. Selanjutnya, untuk memperluas informasi dan menggali data secara mendalam dan terinci yang diperoleh dari orang lain /sumber informasi lain. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sesuai tujuan penelitian. Untuk itu, wawancara dilakukan secara mendalam dan berstruktur kepada informan/ subjek penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah menatap kejadian, gerak, atau proses. Moleong secara metodologis bagi penggunaan pengamatan ialah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat ini menangkap arti fenomena dari

⁸³ Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.35.

segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada waktu itu, pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula sebagai peneliti sebagai sumber, pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.⁸⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi setiap bahan tertulis maupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁸⁵ Sedang menurut Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger agenda dan sebagainya.⁸⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ini untuk mencari data tentang struktur organisasi, keadaan karyawan, siswa, tugas-tugas, sarana prasarana, dokumen kegiatan dan lain yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu penulis menggunakan buku literatur yang relevan dengan penelitian sebagai data sekunder yang diharapkan dapat memunculkan konsep ideal baru yang inovatif yang dapat diterapkan terkait dengan tema penelitian ini.

E. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁸⁷ Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang

⁸⁴ *Ibid*, hlm.126.

⁸⁵ *Ibid*, hlm.161.

⁸⁶ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.234.

⁸⁷ Moleong, Lexy J. *Op.Cit.*, hlm.230.

diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁸⁸

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*membercheck*) dengan tiga sumber data.⁸⁹ Dalam penelitian ini sumber data didapatkan melalui observasi, data dari dokumen sekolah, data hasil wawancara dari beberapa sumber yang terkait dengan tujuan penelitian diantaranya data yang bersumber dari kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik dan dari orang tua. Selain itu juga data yang ber sumber dari dokomen dan observasi.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁹⁰ Dengan memfokuskan pada tujuan penelitian, penulis melakukan observasi, mencari dokumen yang diperlukan dan melakukan wawancara dengan unsur unsur sekolah yang relefan dengan penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagihari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga

⁸⁸ *Ibid*, hlm.273.

⁸⁹ *Ibid*, hlm.274.

⁹⁰ *Ibid*.

lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁹¹ Adapun waktu yang dilakukan untuk melakukan penelitian yaitu pada pagi hari, pada saat istirahat sekolah, siang hari dan waktu setelah pulang sekolah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema pokok dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹² dimulai dari pekerjaan pengumpulan data, diikuti dengan pekerjaan menulis, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan jenis penelitian maka tahapan analisisnya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci yang kemudian dianalisis melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁹³ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Moleong, Lexy J. *Op.Cit.*, hlm.45.

⁹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 92.

dan sejenisnya.⁹⁴ Melalui penyajian data, maka data akan terorganisasi dan tersusun sehingga mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.⁹⁵⁾

Dengan demikian kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah.

Operasionalnya secara singkat ialah pengumpulan data berlangsung ketika peneliti berada dilapangan. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan pedoman/daftar pertanyaan yang tersusun sebelumnya. Selanjutnya pertanyaan dikembangkan agar bisa mengungkap permasalahan secara lebih tajam dan terfokus. Pada saat berlangsung tanya jawab peneliti mencatat jawaban responden. Dari jawaban tersebut kemudian dipilih dan disederhanakan sesuai fokus. Kemudian ditrasformasikan dan disusun dalam bentuk narasi. Penyajian data ini selalu dilacak diperbaiki dan disempurnakan selama penelitian maupun sesudah penelitian untuk selanjutnya dicari makna berdasarkan kajian teoritik dan prinsip idealisme untuk kemajuan sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara selalu diverifikasi dan dilacak secara langsung serta didiskusikan yang kemudian diperbaiki menuju kesimpulan akhir.

⁹⁴ *Ibid*, hal. 95.

⁹⁵ *Ibid*, hal. 99.

